



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BEKASI



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Prepared By :

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BEKASI**



GEDUNG TEKNIS BERSAMA



dinaslh\_kotabekasi

TEKNIS

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama lima tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit perangkat daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tahun 2025-2029. Semoga dengan hadirnya Renstra ini dapat menjadi bahan masukan perencanaan umumnya untuk Dinas Lingkungan Hidup dan khususnya untuk OPD wilayah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada masa yang akan datang dengan mengacu kepada RPJMD 2025-2029 sesuai program Wali Kota Bekasi.

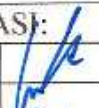


Bekasi, 2025  
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Bekasi,



**Dra. Kiswatiningsih, M.Sc.**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP. 19751222 199803 2 005




## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	10
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	10
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	10
2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas.....	31
2.1.3.1. Realisasi Indikator Kinerja.....	35
2.1.4. Analisa Kelompok Sasaran Layanan.....	39
2.1.5. Realisasi Anggaran.....	40
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	44
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	44
2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
2.2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.....	52
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




h 2

4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup .....	61
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup .....	114
BAB V PENUTUP .....		117

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## DAFTAR TABEL




Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan ...	20
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan .....	21
Tabel 2. 3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	21
Tabel 2. 4	Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Organisasi .....	22
Tabel 2. 5	Data Kondisi Kendaraan Operasional .....	23
Tabel 2. 6	Data Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Operasional .....	27
Tabel 2. 7	Data Aset Dinas Lingkungan Hidup .....	29
Tabel 2. 8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi .....	34
Tabel 2. 9	Analisa Kelompok Sasaran Layanan .....	40
Tabel 2. 10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2020-2024 .....	41
Tabel 2. 11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	44
Tabel 2. 12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi .....	50
Tabel 3. 1	Tabel Keterkaitan Tujuan Renstra DLH terhadap RPJMD Kota Bekasi .....	53
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi .....	55
Tabel 3. 3	Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi .....	58
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi .....	59
Tabel 3. 5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	60
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup .....	63
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	75
Tabel 4. 3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	110
Tabel 4. 4	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Gerakan Kobe Hijau .....	113
Tabel 4. 5	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan .....	113
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 .....	115
Tabel 4. 7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 .....	116

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	12
Gambar 2. 2 Gambar Rumus Perhitungan IKLH.....	31
Gambar 2. 3 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2020 - 2024 .....	32
Gambar 3. 1 Cascading Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025- 2029.....	57
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD 61	
Gambar 4. 2 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..	110

v

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

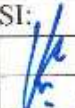


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPJMD yang ditetapkan.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan public, maupun pemberdayaan masyarakat.

1

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

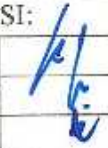

Penyusunan RPJMD juga perlu menyelaraskan dengan RPJMN 2025-2029 dimana penyelarasan tersebut menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 juga menyatakan bahwa RPJMD yang disusun menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD dan menjadi acuan juga dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun pada tiap tahunnya.

Maka secara garis besar hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dari tingkat nasional hingga daerah. RPJPN dan RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan RPJPD provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, RPJPD menjadi dasar penyusunan RPJMD, yang memperhatikan RTRW, KLHS, RANTEK, evaluasi pembangunan 5 tahun terakhir, dan dokumen teknis lainnya.

RPJMD kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah dan dokumen manajemen risiko pembangunan. Proses ini memastikan keselarasan antara perencanaan nasional dan daerah secara berjenjang dan terpadu.

Dari RPJPN dan RPJMN, disusun RPJPD Provinsi (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi) dan RPJPD Kabupaten/Kota, yang juga memperhatikan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) masing-masing daerah. Dokumen ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. RPJMD yang disusun kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) dan Dokumen

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Manajemen Risiko Pembangunan. Pada tahap ini, keterpaduan dan sinergi lintas dokumen sangat penting agar pembangunan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.



Alur ini menggambarkan prinsip top-down dan bottom-up planning, di mana perencanaan pusat menjadi acuan, namun pelaksanaan dan perumusan di daerah mempertimbangkan kondisi lokal serta dokumen evaluatif dan teknis lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman resmi untuk merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), Renstra DLH disusun untuk mengerucutkan kebijakan pembangunan daerah ke dalam langkah strategis yang terukur dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Renstra ini sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sehingga kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan program dapat terjaga.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki fungsi dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terdiri atas beberapa bagian/bidang yaitu, Sekretariat, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum, Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan, dan Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kajian dampak lingkungan, inventarisasi RPPLH, KLHS, dan pemeliharaan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah, penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah, pengendalian penanganan sampah serta kemitraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan




PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan limbah B3 untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang mendasari struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar,

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Serta Limbah Industri Lain;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

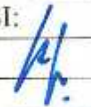


PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
62 Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan
29. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai acuan indikator keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan tujuan RPJMD 2025-2029.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini disusun dengan tujuan:

1. Menyamakan persepsi mengenai perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan dengan Program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Menjadi pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Menjadi tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan
5. Menjadi acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

#### 1.4. Sistematika Penulisan



Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan dokumen ini.

##### **Bab II     Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

Bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Serta permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

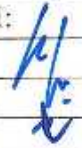

Pada bab ini berisikan mengenai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dimana didalamnya berisi Indikator tujuan/sasaran serta target kinerja yang akan dicapai. Serta strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun mendatang beserta relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode Tahun 2025-2029 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

**Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini berisi informasi mengenai rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan besaran pendanaan yang direncanakan untuk periode Tahun 2025-2029.

**Bab V Penutup**

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi periode tahun 2025-2029 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama periode 2025-2029 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama periode 2025-2029 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada tahun yang akan datang.




#### 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang meliputi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum,

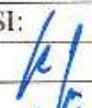


10

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

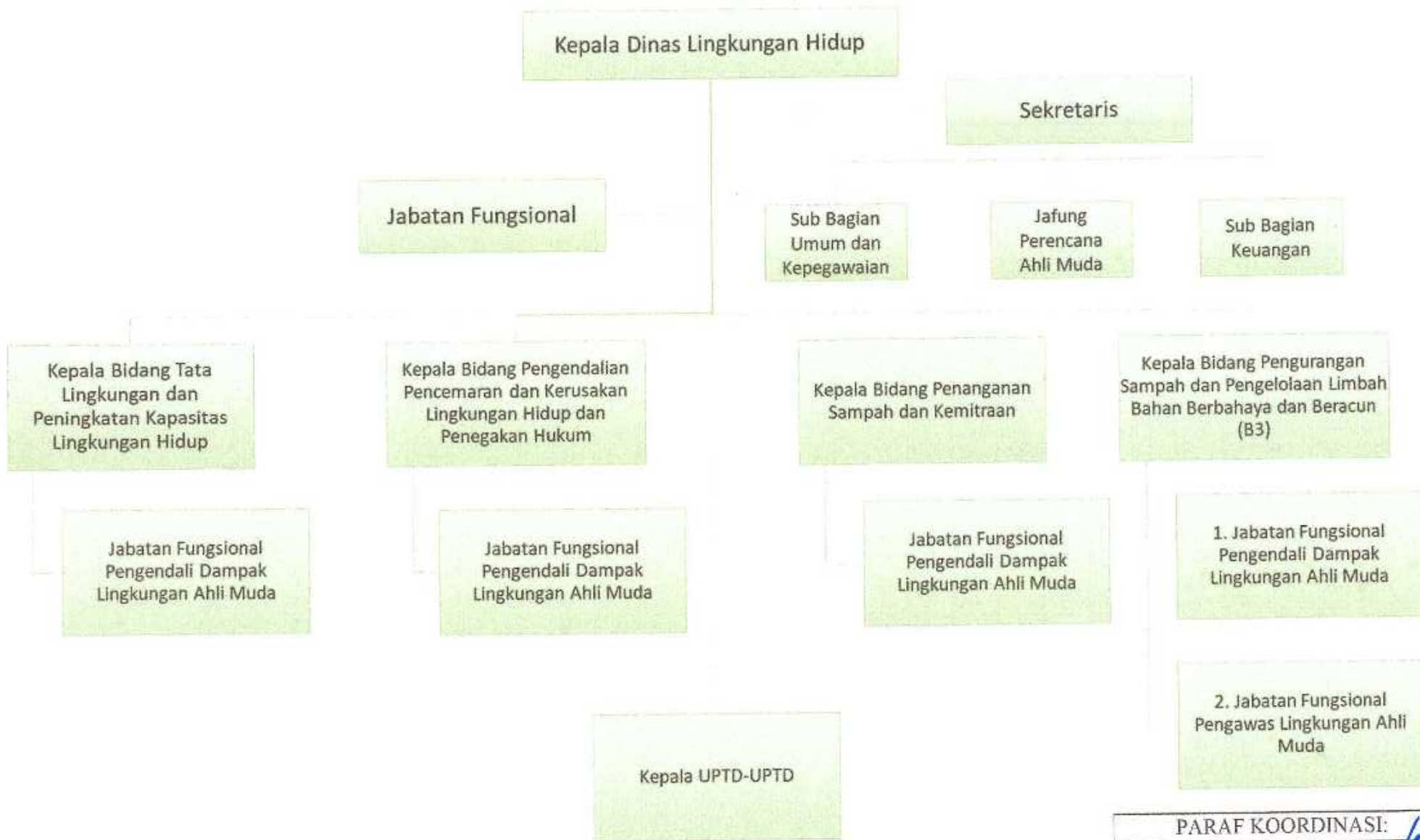
bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang penanganan sampah dan kemitraan, serta bidang pengurangan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup




PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	<i>[Signature]</i>
Kepala Bappelitbangda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas, dijelaskan sebagai berikut:

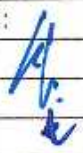


**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang lingkungan hidup;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev);
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- o. mengidentifikasi permasalahan bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan lingkungan hidup yang meliputi pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;

- s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi; melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- v. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- w. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

## 2. Sekretariat Dinas

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

**3. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum**

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan, penentuan, pengembangan, penyusunan, pembinaan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, penentuan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan dalam pelaksanaan penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- e. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, fasilitasi, penelaahan, pembinaan, monitoring, pelaporan, sosialisasi, pengembangan, pengawasan,

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




penyidikan, pengaduan, penegakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;

- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### 4. **Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kajian dampak lingkungan, inventarisasi RPPLH, KLHS, dan pemeliharaan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, penilaian, penyusunan, identifikasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan kajian dampak lingkungan;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, inventarisasi, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, sosialisasi, dan pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Inventarisasi RPPLH, KLHS dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, identifikasi, verifikasi, validasi, penetapan, pembentukan, pengembangan, peningkatan, dukungan diklat, penyuluhan, penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**5. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan**

Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah, penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah, pengendalian penanganan sampah serta kemitraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, penetapan, manajemen dan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah;
- d. perumusan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, penyediaan dan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- e. perumusan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pengawasan, perizinan, pembinaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang undangan dalam kegiatan pengendalian penanganan sampah dan kemitraan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**6. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3**




PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLII	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan limbah B3 untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, penetapan, koordinasi, perumusan dan pembinaan sesuai peraturan perundang undangan dalam kegiatan perencanaan teknis dan manajemen pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengadaan dan penyediaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, pemantauan, pengawasan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### 2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

aset/modal serta sumber daya keuangan. Masing-masing sumber daya tersebut akan dijelaskan berikut ini.

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh pegawai sebanyak **319 pegawai ASN, 409 pegawai PPPK, 114 pegawai Non ASN dan 555 pegawai PHL** (data nominatif Juli 2025). Komposisi dan karakteristik seluruh pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat berdasar golongan, eselon/ jabatan, pendidikan, usia, dan tempat tugas seperti berikut ini.

#### a. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

Jika dilihat berdasar golongan, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	-	-	-
2	II	1	0	1
3	III	2	3	5
4	IV	22	6	28
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Per Juli 2025

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**b. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan**

Berdasarkan jabatannya, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		STATUS PEGAWAI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PNS	PPPK	NON ASN	PHL
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1	0	1	0	0	0
2	Pejabat Administrator (Eselon III)	2	3	5	0	0	0
3	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	22	6	28	0	0	0
4	Pejabat Pelaksana	253	7	260	0	0	0
5	Pejabat Fungsional	11	14	25	0	0	0
6	Pegawai PPPK	351	58	0	409	0	0
7	Pegawai Non ASN	1067	77	0	0	1144	0
8	Pegawai PHL	455	100	0	0	0	555
<b>TOTAL</b>		<b>2162</b>	<b>265</b>	<b>319</b>	<b>409</b>	<b>1144</b>	<b>555</b>

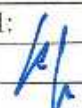


Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Per Juli 2025

**c. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI			
		PNS	PPPK	NON ASN	PHL
1	S3	1	0	0	0
2	S2	19	0	0	0
3	S1	60	71	44	15
4	D3	7	12	9	8
5	SLTA	121	168	597	361
6	SLTP	43	94	262	79

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7	SD	68	64	232	92
<b>TOTAL</b>		<b>319</b>	<b>409</b>	<b>1144</b>	<b>555</b>

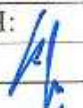

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Per Juli 2025

**d. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tempat Tugas / Unit Organisasi**

Berdasarkan tempat tugas/unit kerja, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Organisasi

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI				JUMLAH TOTAL PER UNIT KERJA
		PNS	PPPK	NON ASN	PHL	
1	SEKRETARIAT DINAS LH	17	7	4	1	29
2	BIDANG TLPKLH	9	6	1	0	16
3	BIDANG PSKM	6	17	1	227	251
4	BIDANG PPKLH	15	5	22	39	81
5	BIDANG PSLB3	11	13	3	0	27
6	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI SELATAN	16	45	105	25	191
7	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI BARAT	14	16	100	14	144
8	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI UTARA	15	28	111	40	194
9	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI TIMUR	36	34	103	10	183
10	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH RAWALUMBU	14	25	73	26	138
11	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH MUSTIKAJAYA	9	31	88	14	142
12	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH BANTARGEBAK	7	23	29	8	67
13	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH MEDAN SATRIA	16	15	61	16	108
14	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH JATIASIH	17	12	69	19	117
15	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH JATISAMPURNA	4	15	50	17	86
16	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH PONDOK GEDE	17	17	78	34	146
17	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH PONDOK MELATI	11	24	49	11	95
18	UPTD KEBERSIHAN JALUR PROTOKOL	55	17	101	8	181

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI				JUMLAH TOTAL PER UNIT KERJA
		PNS	PPPK	NON ASN	PHL	
19	UPTD KEBERSIHAN JALUR KONTAINER	9	17	28	21	75
20	UPTD TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR	5	25	40	0	70
21	UPTD PERBENGKELAN	6	8	4	12	30
22	UPTD LABORATORIUM	5	9	3	5	22
23	UPTD TAMAN HUTAN KOTA	5	0	21	8	34
<b>TOTAL</b>		<b>319</b>	<b>409</b>	<b>1144</b>	<b>555</b>	<b>2427</b>

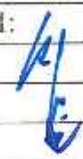

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Per Juli 2025

**c. Aset/Modal**




Dalam menunjang kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat ini memiliki kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Data Kondisi Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
<b>Perahu / Kapal</b>							
1	Palet Perahu	1	1			1	
2	Perahu Karet	4	4			1	3
3	Perahu Fiber	2	2			2	
4	Motor Boat	1	1			1	
<b>Kendaraan Roda 2 (dua)</b>							
1	Sepeda Motor	89	10	9	70	86	3
<b>Kendaraan Roda 3 (tiga)</b>							
1	Gerobak Motor (Baktor)	323	4	191	128	313	10
<b>Kendaraan Roda 4 (empat)</b>							
1	Mobil	22	6	1	15	21	1




PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DI.H	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No.	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
2	Pick Up	47	2	23	23	38	2
3	Mobil Angkutan Penumpang	1				1	
<b>Kendaraan Roda 6 (enam)</b>							
1	Arm Roll	72		62	10	60	12
2	Dump Truck	171		147	24	135	41
3	Light Truck	12		8	4	9	3
4	Truck Tangki Air	4	1	2	1	4	
5	Truck Compactor	5				5	
6	Truck Road Sweeper	7			7	5	2
<b>Bak Kontainer</b>							
1	Bak Kontainer	369	1	250	118	331	86
<b>Alat Berat</b>							
1	Buldozer	5		3	2	4	1
2	Excavator	18		5	13	18	
3	Loader	1		1			1
4	Backhoe Loader	2			2	2	
<b>Mesin - mesin &amp; Alat - alat</b>							
1	Mesin Potong Pohon	8	1		7	8	
2	Mesin Potong Rumput	53	5	9	39	43	10
<b>Mesin - Mesin Pengolah Sampah</b>							
1	Alat Pemilah Sampah	1		1			
2	Alat pengolah sampah	5		5			
3	Mesin Pengolah Sampah	157	28	121			
4	Mesin Pengolah Sampah Plastik	31	15		16		

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No.	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
5	Mesin Pupuk / Kompos	32	7	11	14		
6	Mesin Press	2		1	1		
7	Mesin Biopori	23		23			
<b>Pompa - pompa</b>							
1	Pompa Air	12	3	3	6	9	3
2	Pompa Oli Tangan	1		1			1
3	Pompa Tabung Pengisian Oli Garden	1		1			
4	Pompa Centrifugal	3	3			3	
5	Pompa Submersible	3	3			3	
6	Pompa Alcon	1	1			1	
7	Pompa Artesis	4	4			4	
8	Pompa Grase	1		1		1	
9	Pompa Drum	1		1		1	
10	Pompa Hidrolik	30			30	30	
<b>Alat Bengkel</b>							
1	Mesin Kompresor	1		1			
2	Travo Las Listrik	4		1	3	4	
3	Takel	1		1			1
4	Esytilin	1		1			1
5	Tabung Angin (CO2)	2		2			2
6	Crane	1		1			1
7	Gunting Potong Duduk	1		1			1
10	Alat Pemadam Kebakaran	1		1			1
11	Genset	1	1			1	
12	Aspirating aerator kincir	1		1			1




25

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No.	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
13	Meter Air	1		1			1
14	Tabung Gas	3		3			3
15	Timbangan	1			1		
16	PS	15	11		4	15	
17	Mesin Gerindra	1			1	1	
18	Mesin Potong Besi	1			1	1	
19	Tangga Lipat	2			2	2	

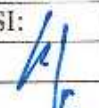

Sumber data: Aset DLH, 2024

Sedangkan jenis dan jumlah peralatan/perlengkapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




Tabel 2. 6 Data Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Operasional

No	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	Baik	Rusak
1	Meja						
	1. Meja Tamu	1			1	1	
	2. Meja Kerja	312	68	127	117	158	154
	3. Meja Komputer	9		9		1	8
	4. Meja Rapat	6	3		3	3	3
2	Kursi						
	1. Kursi Kerja	369	35	69	265	187	182
	2. Bangku Tunggu	4			4	4	
3	Telepon						
4	Handy Talky	31	2	4	25	17	14
5	Mesin Fax						
6	Mesin Fotocopy	2			2	2	
7	Mesin Ketik						
	1. Mesin Ketik Manual	1	1				1
	2. Mesin Ketik Listrik	19	5	12	2	8	11
8	Mesin Hitung Uang	1		1		1	
9	Komputer	196	16	42	138	100	96
10	UPS	6		4	2	2	4
11	Laptop	46	11	4	31	24	22
12	Hard Drive External	27	8	1	18	19	8
13	Server	4	1		3	4	
14	Router	1			1	1	
15	Software Display	1			1	1	
16	Projektor / Infocus	13	3	1	9	8	5
17	Layar Projektor / Infocus	3	1		2	2	1
18	Pointer	1			1	1	
19	Alat Pengeras Suara						
	1. Amplifier	1	1			1	
	2. Sound Sistem	2	2			2	
	3. Microphone	1			1	1	
	4. Speaker	1			1	1	
	5. Megaphone	1			1	1	
20	Pemindai / Scanner	1			1	1	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	Baik	Rusak
21	Printer	158	8	26	124	82	76
22	Stabilizer	6			6	6	
23	Kamera	21	7	3	11	11	10
24	Tripod Kamera	3			3	3	
25	Handy Cam	2	2			1	1
26	Alat Penghancur Kertas	12			12	7	5
27	Filling Besi / Cabinet	46	11	23	12	25	21
28	Lemari Besi	103	24	49	30	55	48
29	Lemari Kayu	15	1	1	13	13	2
30	Lemari Pakaian	1		1		1	
31	Lemari Kaca	3		1	2	2	1
32	Lemari Display	2			2	2	
33	Lemari Loker	1			1	1	
34	Lemari Loker Besi	3			3	3	
35	Rak	46	7	7	32	26	20
36	Kitchen Set	1			1	1	
37	Bak Cuci Piring	1			1	1	
38	Dispenser	13		2	11	7	6
39	Kulkas	3		1	2	2	1
40	Sofa	17	4	5	8	10	7
41	Televisi	9			9	9	
42	Moubiler	4	1	1	2	2	2
43	Cermin	1		1			1
44	Mesin Absensi	23			23	23	
45	Finger Print Door Lock	3			3	3	
46	Air Conditioner (AC)	119		3	116	116	3
47	Kipas Angin	7		7		4	3
48	Kipas Exhaust	2	2			2	
49	Kabel Roll	1			1	1	
50	Pintu	4			4	4	
51	CCTV	23	1		22	22	1
52	Drone	3			3	3	

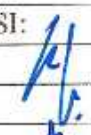


Sumber data: Aset DLH, 2024

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

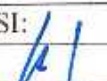
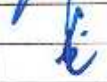

Sedangkan jenis dan jumlah aset tidak bergerak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 7 Data Aset Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian (tambahkan satuan) konfirm aset	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPL H	Eks-Dinsi h	DL H	baik	rusak
	<b>Tanah</b>						
1	Tanah / Danau	1 area		1 area			
2	Tanah TPA	4 area		4 area			
	- TPA Zona 5 (masuk di aset tanah)	1 area		1 area		1 area	
	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bak Penampungan Sampah	4 kubik		4 kubik		4 kubik	
2	Tempat Pembuangan Sampah	3	1	2		2	1
3	Transfer Depo	4		4		1	3
4	Landasan Kontainer	25		25		5	20
5	Paving Block	2 titik	2 titik			2 titik	
6	Bank Sampah	1 area		1			
7	Rumah Kompos	18	11	11			
8	Auning Pemilahan Sampah	1		1		1	
9	Stasiun Peralihan Antara	2		2		2	
10	Alat Ukur Kualitas Udara (bangunan)	1 area			1	1	
	<b>Bangunan di UPTD Perbengkelan</b>						
11	Poll	2		2		2	
12	Emplacement	1		1		1	
13	Pagar	1		1		1	
14	Hanggar	1		1		1	
	<b>Bangunan di UPTD TPA Sumur Batu</b>						
15	Pintu Gerbang	1		1			1
16	Gapura	1		1			1
17	Taman	1		1			1
18	Hanggar Kompayer Sampah	1		1			1
19	Jembatan Timbang	3		3		1	
20	Pagar – pagar	6		6		6	
23	Pos Ritase	1		1			1

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No.	Uraian (tambahkan satuan) konfirm aset	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPL H	Eks-Dinsi h	DL H	baik	rusak
	<b>Bangunan di UPTB Laboratorium Lingkungan</b>						
25	Gedung Laboratorium	2	2			2	
26	Pagar	1	1			1	
27	Pengelolaan Limbah	1	1			1	
	<b>Bangunan di UPTD Taman dan Hutan Kota</b>						
28	Pos	4	4			4	
29	Sarana Olah Raga	2	2			2	
30	Taman Hijau	1	1			1	
31	Tiang Lampu	1	1			1	
32	Air Mancur	1	1			1	
33	Musholah	1	1			1	
34	Pagar	2	2			2	
35	Tugu – tugu	15	15			15	
	<b>Bangunan Kantor Dinas</b>						
36	Ruang Aula / Rapat	1	1			1	
37	Gudang	1	1			1	
	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>						
1	Landasan Kontainer	1		1		1	
2	Tempat Penampungan Sampah	9		9			
3	Rumah Kompos	1		1			
4	Sumur Resapan	28	106		50		
5	Instalasi Listrik	1	1			1	
	<b>Jalan / Jaringan di TPA Sumur Batu</b>						
6	Geomembrane	1		1		1	
7	Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS)	2		2		2	
8	Pengelolaan Air Sampah / Limbah	2		2			2
9	Instalasi Listrik dsb.						
	Tiang Kabel	2		2			2
	Panel Pompa	1		1			1
	Kabel	2		2			2
	Panel Distribusi	1		1			1
11	Jaringan untuk Alat Ukur Kualitas Udara	1			1	1	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No.	Uraian (tambahkan satuan) konfirm aset	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPL H	Eks-Dinsi h	DL H	baik	rusak
	<b>Jalan / Jaringan di UPTB Laboratorium Lingkungan</b>						
12	Instalasi Listrik dsb.	1	1			1	
	<b>Jalan / Jaringan di UPTD Taman dan Hutan Kota</b>						
13	Kolam air	1	1			1	
14	Lampu - lampu Penerangan	8	8			8	

Sumber data: Renstra DLH 2018-2023

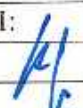


### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi tahun 2020 sampai dengan 2024 yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi pada saat RPJMD 2019-2023 dan RPD 2024-2026 yang prosesnya diinput melalui website IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Gambar Rumus Perhitungan IKLH

$$IKLH \text{ Kabupaten/ Kota} = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Sumber data: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020 s/d 2024 dapat digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 2. 3 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2020 - 2024



Sumber data: Website Tabang Kota Bekasi melalui <https://tabang.bekasikota.go.id>

Grafik menunjukkan perkembangan target, realisasi, dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bekasi selama periode 2020–2024. Secara umum, target IKLH setiap tahun berada pada kisaran 60–63 poin.

Pada tahun 2020, target ditetapkan sebesar 52,00 dengan realisasi mencapai 60,42, sehingga capaian mencapai 116% dari target dan menjadi pencapaian tertinggi selama periode ini. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan, di mana target naik menjadi 61,02 sementara realisasi hanya 44,50, dengan capaian turun menjadi 73%. Tren perbaikan mulai terlihat pada 2022 dengan realisasi sebesar 46,63 dari target 61,93 (capaian 75%), kemudian sedikit menurun kembali pada 2023 dengan capaian 73% (target 62,85 dan realisasi 45,81). Memasuki 2024, kinerja meningkat cukup tajam. Dengan target 60,00, realisasi mencapai 50,70, menghasilkan capaian 85%, atau tertinggi kedua setelah 2020.

Secara keseluruhan, periode lima tahun ini menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi berbagai faktor, namun upaya perbaikan di tahun terakhir memberikan indikasi pemulihan dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bekasi.




PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020-2023 memiliki 5 (lima) indikator diantaranya:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Persentase daur ulang sampah melalui aktivitas 3R
3. Persentase Pengelolaan Timbunan Sampah yang ditangani
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dan pada IKU Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024-2025 memiliki 4 (empat) indikator diantaranya:

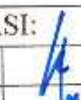


1. Persentase Pengelolaan Timbunan Sampah yang ditangani
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52.00	61.02	61.93	62.85	60.00	60.42	44.60	46.63	45.81	50.70	Menjadi IKU 2020-2023
2	Persentase daur ulang sampah melalui aktivitas 3R	27%	24%	26%	27%	12%	14%	11,70%	11,97%	10,85%	11,66%	Menjadi IKU 2020-2023
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup	65.8	67.6	69.4	72	74.11	73.24	77.87	78.12	78.14	78.56	Menjadi IKU 2020-2024
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	77	77	77	78	76.67	77.58	82.51	83.57	90.27	Menjadi IKU 2020-2024
5	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang ditangani	75%	74%	73%	72%	64%	64%	63%	64%	75,79%	79,05%	Menjadi IKU 2020-2024
6	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air					51,10%					56,86%	Menjadi IKU DLH 2024

Sumber data: Website Tabang Kota Bekasi melalui <https://tabang.bekasikota.go.id/>

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

### 2.1.3.1. Realisasi Indikator Kinerja




Akuntabilitas kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dinilai melalui pengukuran realisasi program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RPJMD 2025-2029, kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi terkait urusan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura. Kebijakan umum tersebut dituangkan dalam beberapa program, yaitu

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Oleh karena itu kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan realisasi pencapaian target program-program yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024.

#### a. Realisasi Indikator Kinerja Dinas LH Tahun 2024

1. Kinerja Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dikelola oleh Provinsi Jawa Barat dengan lokasi bertempat di Karawang/Purwakarta sehingga biaya operasional pengangkutannya terlalu besar. Sedangkan di Kota Bekasi sudah mempunyai lokasi TPA di Sumurbatu yang bisa dikelola dan dimanfaatkan. DLH sudah bersurat ke TAPD terkait penghapusan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional untuk RENSTRA Tahun 2024-2026.

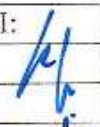


## 2. Kinerja Program Pengelolaan Sampah

Indikator sasaran persentasi pengelolaan timbulan sampah yang ditangani, meliputi indikator kinerja program pengelolaan sampah yaitu jumlah penilaian operasional TPA/TPST/TPA, persentase sampah yang terangkut ke TPA, dan persentase cakupan area pelayanan dan persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R.

- Perhitungan indikator sasaran persentase pengelolaan timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2024 adalah 79,05% (jumlah sampah yang ditangani 519.522,4 ton, jumlah potensi timbulan sampah 657.199,40)
- Penilaian operasional TPA/TPST/SPA dengan target sebesar 73.05 poin namun untuk perolehan nilai adipura tahun 2024 berada di tahun 2025. Sedangkan nilai adipura yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah nilai adipura yang diperoleh pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 71.50 belum mencapai target dikarenakan masih adanya open dumping di TPA sehingga komponen penilaian di TPA menjadi rendah menyebabkan penilaian keseluruhan belum dapat mencapai target 73 poin.
- Persentase sampah yang terangkut ke TPA dengan target 62% sehingga realisasinya sebesar 71,11% (458.987,24 ton).
- Persentase cakupan area pelayanan dengan target 100% sehingga realisasinya sebesar 100%
- Persentase sampah yang berkurang melalui 3R dengan target 12% sehingga realisasinya sebesar 11,66% (60.565,16 ton)

## 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meliputi indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mencakup perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU). Berikut hasil realisasi capaian target:

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Hasil perhitungan Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024, target Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah 60.00 dan realisasi yang dicapai adalah 50.70 sehingga realisasinya belum memenuhi target.
- Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bekasi pada Tahun 2024 adalah 38,62 dengan kriteria “Marginal” “Buruk” atau kelas IV sehingga belum memenuhi target.
- Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bekasi pada Tahun 2024 adalah 75,10 dengan kategori “Baik” sehingga realisasinya tercapai

**4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

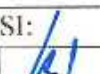


Indikator kinerja program tersebut yaitu persentase usaha dan/atau yang memiliki TPS limbah B3.

- Ijin TPS Limbah B3 hanya berlaku satu kali dan ijin perpanjangan tidak dilakukan semenjak ada Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Thn 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Persentase usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3, dari 100 titik lokasi usaha/kegiatan hanya 65% yang ditargetkan untuk di rekomendasikan izin lingkungan terkait pengelolaan limbah B3 yaitu 65 usaha/kegiatan, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 55% atau 55 usaha/kegiatan.

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Indikator kinerja program tersebut berdasarkan Renstra RPD 2024-2026, pada Tahun 2024 Pembinaan dan Pengawasan dipisah dalam 2 indikator yaitu:

- Persentase Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, terdapat 109 perusahaan (182%) sehingga capaiannya tercapai yang diperoleh dari perusahaan yang mendapatkan rekom izin lingkungan untuk KA-ANDAL, AMDAL, DELH, DPLH dan UKL – UPL serta 61 perusahaan yang dilakukan pengawasan dan 45 perusahaan yang dilakukan pembinaan.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Persentase Pembinaan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, terdapat 45 perusahaan (90%) yang dilakukan pembinaan

**6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Indikator kinerja program tersebut yaitu persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan.

- Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2024, target penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100%. Realisasinya, dari 15 kasus pengaduan yang masuk seluruhnya sudah ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa target Tahun 2024 tercapai 100%.

**7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**




Indikator kinerja program tersebut yaitu Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam lingkungan hidup.

- Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam Lingkungan Hidup pada tahun 2024, terdiri dari gerakan peduli lingkungan, program kampung iklim, dan penilaian adiwiyata. Sehingga proses yang telah berjalantelah selesai atau 100%.

**8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Indikator kinerja program tersebut terdapat 2 indikator yaitu :

- Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup telah selesai dilaksanakan sehingga realisasinya tercapai.
- Persentase Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup telah selesai dilaksanakan sehingga realisasinya tercapai

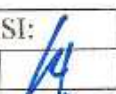


PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

#### 2.1.4. Analisa Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari peran serta berbagai mitra perangkat daerah dan dukungan pihak lainnya. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Berbagai perangkat daerah terkait, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain perangkat daerah, terdapat juga kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan DLH Provinsi Jawa Barat yang secara aktif berkontribusi dalam perencanaan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat luas juga memberikan dukungan yang signifikan, baik melalui penyediaan data, inovasi teknologi, pendanaan, maupun penguatan partisipasi publik. Sinergi ini memungkinkan pelaksanaan berbagai kegiatan strategis, seperti pengelolaan sampah terpadu, pengendalian pencemaran, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, serta kampanye edukasi lingkungan, sehingga kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi target/sasaran kelompok yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 9 Analisa Kelompok Sasaran Layanan




No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Bidang Penanggung Jawab	Target Sasaran
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dacrah*	a. Sekretariat DLH b. Bidang PPKLHPH c. Bidang TLPKLH d. Bidang PSKM e. Bidang PSPLB3	✓ Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH ✓ DLH Provinsi Jawa Barat ✓ Ekoregion Jawa ✓ Perangkat dacrah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi
2	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	a. Bidang PSKM b. Bidang PSPLB3	✓ Perangkat daerah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	a. Bidang TLPKLH b. Bidang PPKLHPH	✓ Perangkat daerah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	a. Bidang TLPKLH b. Bidang PPKLHPH	✓ Perangkat dacrah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi

Sumber data: Data diolah oleh Sekretariat DLH, 2025.

Keterangan: \*)Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dari komponen yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA dan IKU merupakan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, sedangkan IKTL merupakan tupoksi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

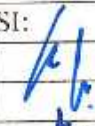


#### 2.1.5. Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada level program, akan dianalisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.8

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

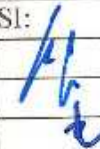
Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89.654.650.000	0	0	0	0	88.866.373.152	0	0	0	0	99,12 %	0%	0%	0%	0%	17.930.930.000	17.773.274.630
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	535.000.000	0	0	0	0	420.977.950	0	0	0	0	78,69 %	0%	0%	0%	0%	107.000.000	84.195.590
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	98,00 %	0%	0%	0%	0%	10.000.000	9.800.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	0	56.191.182.900	59.948.164.537	65.088.922.224	74.765.879.340	0	54.419.911.708	56.660.210.330	58.372.029.537	69.431.872.324	0,0%	0%	0%	0%	0%	51.198.829.800	47.776.804.780
Program Pengelolaan Persampahan	58.970.038.876	243.032.257.850	384.440.272.780	423.452.889.231	418.684.316.704	50.639.363.971,00	219.520.432.785	322.740.184.010	356.277.108.609	331.356.616.101	85,87 %	90,33%	83,95%	84,14%	79,14%	305.715.955.088	256.106.741.095
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0	150.000.000	978.775.000	3.495.434.510	488.686.500	0	128.797.920	522.295.310	3.422.410.093	432.330.908	0%	85,87%	53,36%	97,91%	88,47%	1.022.579.202	901.166.846
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)	0	100.000.000	10.960.046.000	13.466.987.200	13.026.477.000	0	38.050.000	10.685.380.000	12.054.320.000	10.478.912.000	0%	38,05%	97,49%	89,51%	80,44%	7.510.702.040	6.651.332.400

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.788.930.000	56.421.764.850	27.636.005.103	14.626.547.462	12.198.356.140	7.005.784.150.00	39.817.966.880	10.228.960.015	9.264.542.682	9.122.295.605	23,52 %	70,57 %	37,01 %	63,34 %	74,78 %	28.134.320.711	15.087.909.866		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.379.299.190	0	0	0	0	1.422.016.608,00	0	0	0	0	59,77 %	0%	0%	0%	0%	475.859.838	284.403.322		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	30.000.000	0	0	0	0	4.215.625	0	0	0	0	14,05 %	0%	0%	0%	0%	6.000.000	843.125		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	0	0	381.430.000	459.532.000	250.000.000	0	0	66.650.000	397.952.500	234.765.500	0%	0%	17,47 %	86,60 %	93,91 %	218.192.400	139.873.600		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	0	200.000.000	34.855.000	34.855.000	0	0	131.880.500	34.567.000	33.320.000	0%	0%	65,94 %	99,17 %	95,60 %	53.942.000	39.953.500		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	50.000.000	32.194.000	0	50.000.000	0	14.850.000	6.600.000	0	13.570.000	0%	29,70 %	20,50 %	0,0%	27,14 %	26.438.800	7.004.000		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	0	0	266.910.000	0	0	0	0	263.370.000	0%	0%	0%	0%	98,67 %	53.382.000	52.674.000		
<b>Jumlah</b>	<b>81.407.918.066</b>	<b>355.945.205.600</b>	<b>484.576.887.420</b>	<b>520.625.167.627</b>	<b>519.765.480.684</b>	<b>148.407.731.456</b>	<b>313.940.009.293</b>	<b>401.042.160.165</b>	<b>439.822.930.421</b>	<b>421.367.052.438</b>						<b>394.416.201.879</b>	<b>327.048.706.534</b>		

Sumber Data: Data diolah oleh Sub Bagian Keuangan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

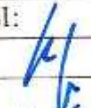


Dari tabel diatas dianalisis faktor keberhasilan, faktor kegagalan, upaya perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerjanya sebagai berikut:

Faktor keberhasilan/faktor kegagalan, diantaranya:

1. Data kualitas udara diperoleh berdasarkan pengujian alat passive sampler yang berasal dari KLHK RI dan DLHD Provinsi Jawa Barat sebanyak masing-masing 4 titik lokasi selama 2 (dua) periode)
2. Hasil nilai IKA berdasarkan perhitungan pengujian kualitas air belum maksimal karena titik lokasi pemantauan kualitas air banyak lokasi
3. Masih banyaknya kasus pencemaran air yang dilakukan pelaku usaha/kegiatan
4. Dalam melakukan penanganan sampah baik di wilayah layanan titik angkut maupun di tempat pembuangan akhir, masih banyak kendala yang harus dihadapi, yaitu kurangnya peralatan dan perlengkapan kebersihan, kurangnya armada kendaraan angkutan sampah, kondisi kendaraan angkutan sampah yang butuh peremajaan sehingga anggaran perawatan dan perbaikan bisa lebih efisien.

Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut, diantaranya:

1. Melakukan pengujian secara rutin baik pengujian kualitas udara maupun pengujian kualitas air
2. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan baik yang telah memiliki izin lingkungan ataupun belum memiliki;
3. Meningkatkan pemantauan rutin kualitas sungai dan memetakan sumber-sumber pencemar potensial.;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar melalui kampanye lingkungan hidup.
5. Melakukan pembagian per lokasi yang mewakili cluster pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi secara proporsional
6. Melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala yang dilakukan oleh UPTD Perbengkelan

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

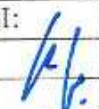


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, tugas dan fungsi utama pelayanan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan :

1. Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum
2. Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Penanganan Sampah dan Kemitraan
4. Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3




Gambaran masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi isu-isu strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi antara lain :

Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

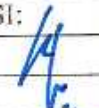


No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Bekasi	<p>Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum</p> <p>Masih terdapat pencemaran kerusakan lingkungan hidup yang mengurangi kualitas air dan udara</p> <p>Belum tercapainya nilai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IKA: 38.62 (target:40.00)</li> <li>- IKU: 75.10 (target: 62.20)</li> <li>- IKL: 26.33</li> </ul> <p>IKLH (nilai yg dicapai)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rendahnya kesadaran usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>● Belum optimalnya pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan</li> <li>● Belum dilakukan identifikasi dan pemetaan sumber pencemar</li> <li>● Kurangnya Jabatan Fungsional (Jabfung) PPLH dalam upaya</li> </ul>

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>penegakan hukum lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemantauan kualitas lingkungan tidak didukung sumber daya yang memadai.</li> <li>● Penanganan pencemaran lingkungan yang telah dilaksanakan masih sangat terbatas apabila dibandingkan tingkat pencemaran lingkungan yang ada.</li> <li>● Pemulihan kerusakan lingkungan yang telah dilakukan masih sangat terbatas</li> <li>● Fasilitasi pengaduan dan sengketa Lingkungan yang telah dilakukan masih sangat terbatas.</li> <li>● Pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi oleh penerima izin lingkungan hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam setahun per titik lokasi.</li> </ul>
		Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		Dinamika proses penetapan persetujuan lingkungan masih kurang akan pemahaman stakeholder terkait proses amdal UKL-UPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup</li> <li>● Belum ditetapkannya dokumen RPPLH dan KLHS yang telah tersusun</li> <li>● Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup belum tersusun berdasarkan data dan informasi yang memadai</li> </ul>

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kordinasi penyusunan tata ruang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal</li> <li>• Belum tersedianya beberapa dokumen/instrumen/indeks terkait penataan dan pemeliharaan lingkungan</li> </ul>
2	Penanganan sampah belum terkelola secara optimal	<p>Penanganan Sampah dan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan sampah dan kemitraan yang telah dilaksanakan belum dapat berjalan secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan sampah yang telah dilakukan masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi sampah</li> <li>• Kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan pihak ketiga masih belum signifikan</li> <li>• TPA yang ada sudah overload dan sudah tidak ada lahan untuk perluasan TPA dikemudian hari</li> <li>• Penanganan sampah masih menggunakan cara konvensional</li> </ul>
		<p>Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan sampah dan Limbah B3 yang telah dilaksanakan belum dapat berjalan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi data dan informasi produksi sampah dan limbah B3 belum maksimal</li> <li>• Pembinaan dan upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan sampah belum menunjukkan hasil yang signifikan</li> </ul>

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimal upaya pemilahan sampah dan penerapan konsep 3R</li> <li>• Pengelolaan limbah B3 khususnya limbah B3 Rumah Tangga masih sangat terbatas</li> </ul>

Sumber Data: Data diolah oleh Sekretariat, 2025.

### 2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan tahun renstra sebelumnya, sasaran jangka menengah renstra K/L dan perangkat daerah, RTRW kewilayahan, serta amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs), maka isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, antara lain adalah:

#### 1. Penegakan Hukum Lingkungan




Masih kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### 2. Meningkatnya Pencemaran Lingkungan

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Dampaknya antara lain, terjadinya pencemaran air, udara dan tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan;

#### 3. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Belum optimalnya kegiatan penutupan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia (2.150 pohon) Hal ini menjadi isu strategis karena kecenderungan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penggunaan lahan terbangun yang meningkat pesat di Kota Bekasi untuk dijadikan area perkantoran maupun pusat niaga telah menekan luasan area terbuka hijau.

**4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di Kota Bekasi**

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik, mengakibatkan tingginya timbulan sampah dan masih banyaknya sampah yang dibuang di sembarang tempat. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan sistem kumpul angkut-buang dan belum dilakukan pembatasan timbulan sampah, upaya pemilahan serta lemahnya manajemen pengelolaan sampah. Saat ini, masih bertumpu pada satu titik pembuangan yaitu TPA Sumurbatu tanpa ada pengelolaan. Sehingga perlu ada penataan dan pengelolaan yang lebih baik di TPA Sumurbatu yang selama ini hanya *open dumping* dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

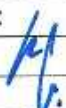


**5. Peningkatan peran serta masyarakat**

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan pemerintah tidak akan dapat sepenuhnya menangani pengelolaan lingkungan dan sampah sehingga diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat.

**2.2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*.**




Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan diantaranya yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 13 : Penanganan dan Perubahan Iklim
- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dituntut pula berupaya mewujudkan target dari indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait. Indikator-indikator tersebut antara lain :

- a. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- b. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
- c. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
- d. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
- e. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

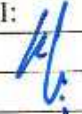


Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kondisi lingkungan yang masih terjaga di beberapa wilayah	Meningkatnya pencemaran lingkungan serta kurangnya lahan RTH	Penanggulangan bencana dan perubahan iklim;  Penurunan kualitas air dan udara	Persaingan sumber daya alam	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Perubahan iklim dan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Hukum Lingkungan masih terdapat pelaku usaha / kegiatan yang belum taat dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>2. Meningkatnya Pencemaran Lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industry</li> <li>3. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal terhadap penggunaan lahan terbangun yang meningkat pesat di Kota Bekasi untuk dijadikan area perkantoran maupun pusat niaga telah menekan luasan area terbuka hijau.</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dan</li> </ol>

PARAF KOORDINASI:	
Ptt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						<p>pelestarian lingkungan di Kota Bekasi, sehingga perlu ada penataan dan pengelolaan yang lebih baik di TPA Sumurbatu yang selama ini hanya <i>open dumping</i> dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan.</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan pemerintah tidak akan dapat sepenuhnya menangani pengelolaan lingkungan dan sampah sehingga diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat.</p>

Sumber data: Data yang diolah Sekretariat DLH, 2025

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Dalam menjalankan urusan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup mendukung visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”




Gambar 3. 1 Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025-2029



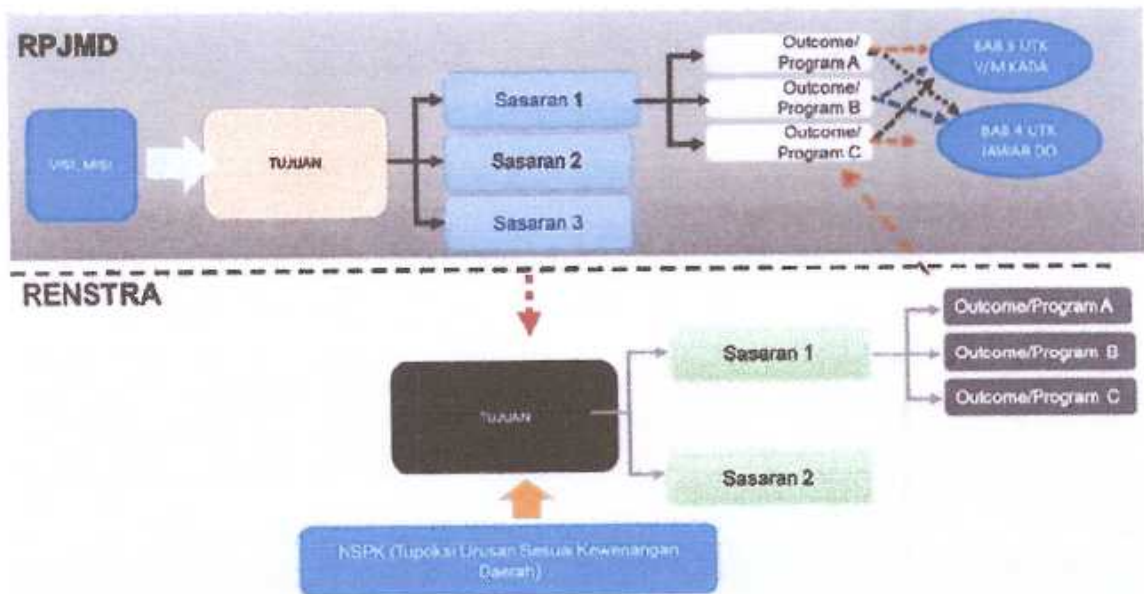
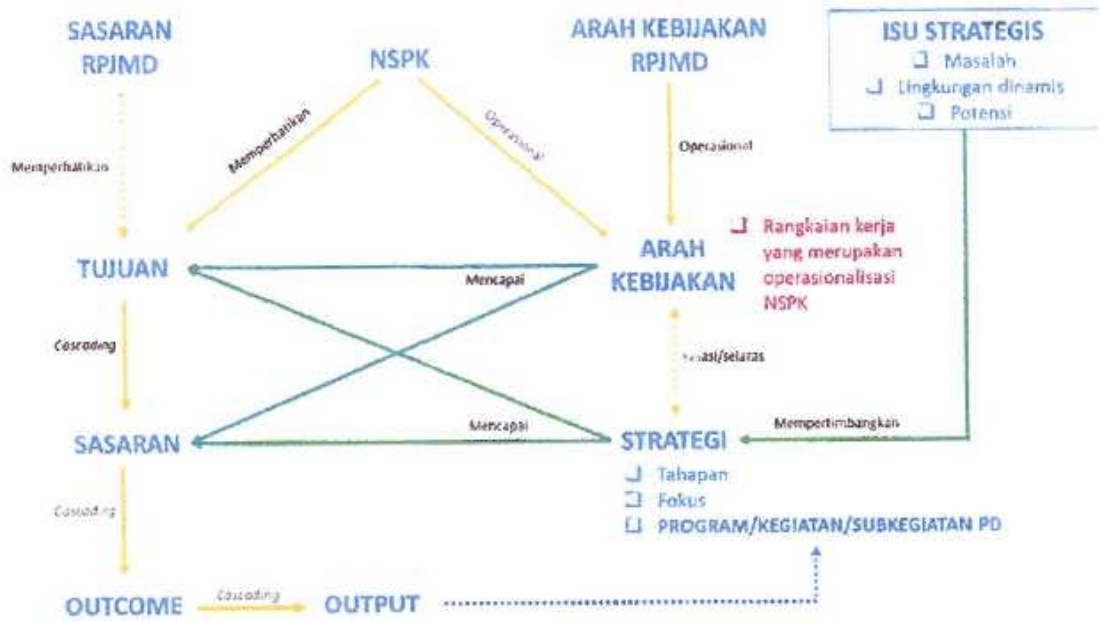
Sumber data: Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

Penjelasan pada Visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

Selain Visi, Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung Misi, Tujuan serta Sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, dapat dilihat pada gambar berikut:

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diperoleh Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:






PARAF KOORDINASI:

Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
					6	7	8	9	10	11
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur unit kerja yang tugas, pokok, dan fungsinya terkait dengan media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) (Pasal 18 ayat 2 Permen LHK No 27 Tahun 2021)</li> <li>- Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3. (Pasal 4 Perwal Kota Bekasi No 113 Tahun 2021)</li> <li>- Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi</li> </ul>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Nilai	47,16	47,46	47,75	48,04	48,34	48,64
	Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Poin	53,60	53,70	53,80	53,90	54,00	54,10	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,76	56,96	57,16	57,36	57,56	57,76	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	45,55	46,05	46,55	47,05	47,55	48,05	

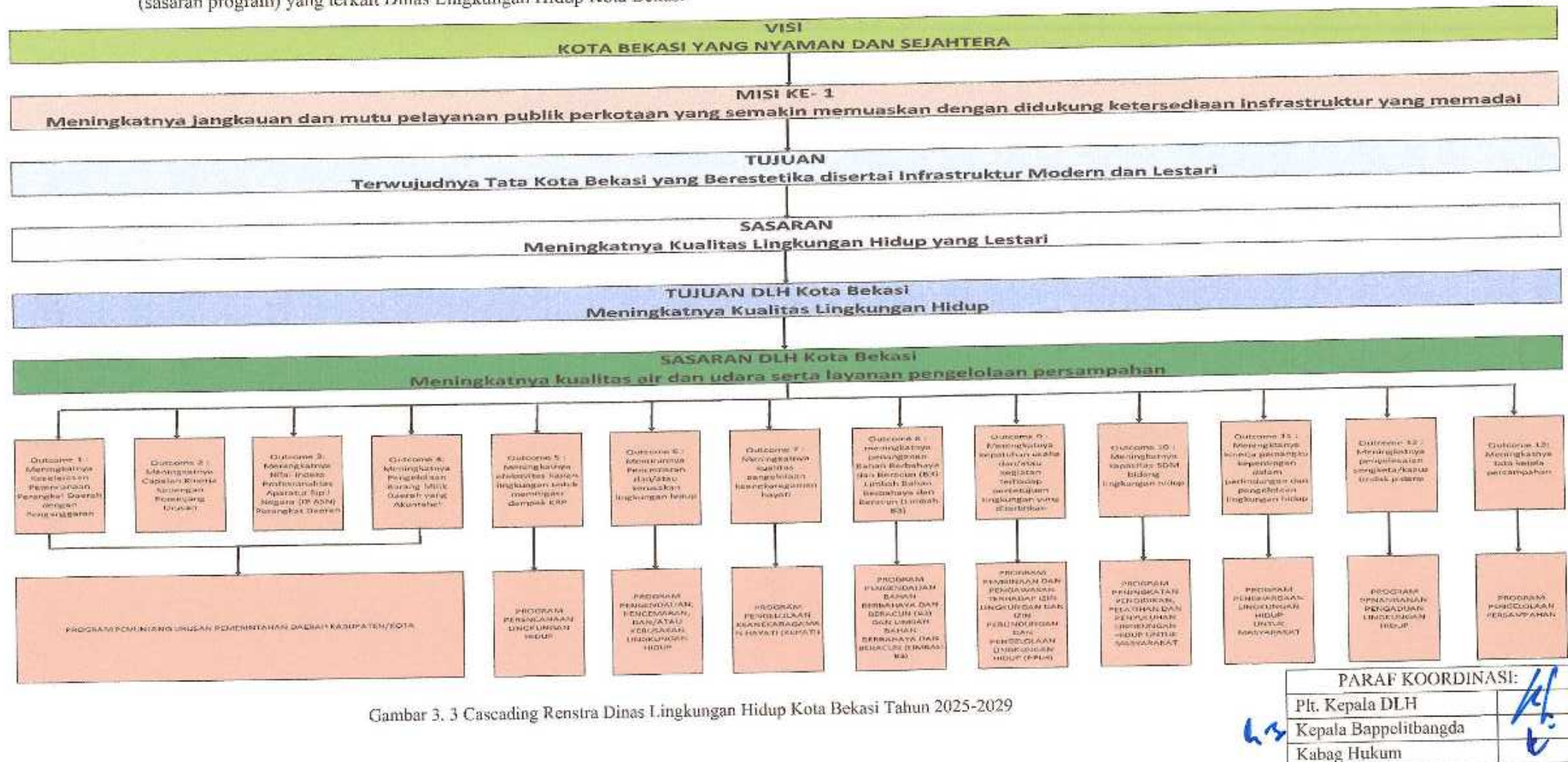
PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. (Pasal 1 ayat 7 Perpres No 97 Tahun 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. (Prioritas Nasional 2 Asta Cita)</li> <li>- Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari (Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029)</li> </ul>										

Sumber data: Dokumen Renstra DLH dan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berikut digambarkan alur kinerja dari mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi sampai dengan tujuan, sasaran sampai outcome (sasaran program) yang terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi






Gambar 3. 3 Cascading Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Penahapan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kota, serta menjamin keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Infrastruktur Persampahan di TPA Sumur Batu, Penutupan Open Dumping menjadi Sanitary Landfill, penguatan Sumber Daya Manusia dan pemeliharaan armada sampah,	Pemeliharaan Kebun Buah, Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga, Budidaya Magoot, Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, Pembangunan Depo untuk penyimpanan limbah B3 Pemantapan program bank sampah insentif pengelolaan sampah.	Penataan TPA Sumur Batu dengan menggunakan PLTSA, penguatan SDM yang unggul dan berkelanjutan, Pengembangan RTH dan kawasan hijau, Integrasi program lingkungan lintas sektor	Finalisasi seluruh program dan kegiatan Renstra, Persiapan substansi untuk Renstra 2030–2034, Sinkronisasi dengan RKPD dan RPJPD 2025–2045	Integrasi kebijakan lingkungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Penyesuaian indikator kinerja dengan arah pembangunan nasional

Sumber data: Data diolah Sekretariat DLH, 2025.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

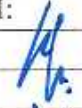


Strategi dan arah kebijakan merupakan landasan penting dalam mewujudkan visi, misi, serta sasaran pembangunan lingkungan hidup Kota Bekasi tahun 2025–2030 yang memuat kerangka kebijakan yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus menjadi pedoman dalam pemilihan prioritas dan penyusunan rencana operasional tahunan.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perwal Kota Bekasi No 38 Tahun 2021</li> <li>● Perwal Kota Bekasi No 38 Tahun 2021</li> <li>● Perpres No 97 Tahun 2017</li> <li>● Perwal Kota Bekasi No 38 Tahun 2021</li> <li>● Prioritas Nasional 2 Asta Cita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kesadaran kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital</li> <li>● Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.</li> </ul>	

Sumber data: Data diolah Sekretariat DLH, 2025.




Perumusan strategi dan arah kebijakan didasarkan pada analisis kondisi lingkungan, evaluasi capaian periode sebelumnya, serta proyeksi tantangan lima tahun mendatang, termasuk dinamika pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim. Fokus utama diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), serta penguatan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai mandat utama pengelolaan persampahan dan pengangkutan sampah perkotaan. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara serta pengelolaan sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan kepatuhan pembuangan limbah cair melalui sanksi administratif dan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian pencemaran dan rehabilitasi kualitas badan air</li> <li>• Penetapan zona rawan pencemaran air dan prioritas penanganan sungai/kali</li> </ul>
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kebijakan zona rendah emisi dan penerapan uji emisi kendaraan</li> <li>• Penambahan ruang terbuka hijau dan vegetasi penyerap polutan</li> <li>• Pemberian insentif industri untuk penerapan teknologi ramah lingkungan</li> <li>• Penetapan kebijakan zona rendah emisi dan penerapan uji emisi kendaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan emisi pencemar udara dari transportasi, industri, dan sumber lainnya</li> <li>• Peningkatan kapasitas pemantauan dan inventarisasi kualitas udara perkotaan</li> </ul>
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan regulasi dan pengawasan pembuangan sampah ilegal</li> <li>• Peningkatan kapasitas armada dan infrastruktur pengangkutan sampah</li> <li>• Penetapan skema pendanaan multiyear untuk infrastruktur pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan swasta dalam pengelolaan sampah.</li> <li>• Penetapan target pengurangan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang secara bertahap</li> </ul>

Sumber data: Rancangan RPJMD 2025-2029

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

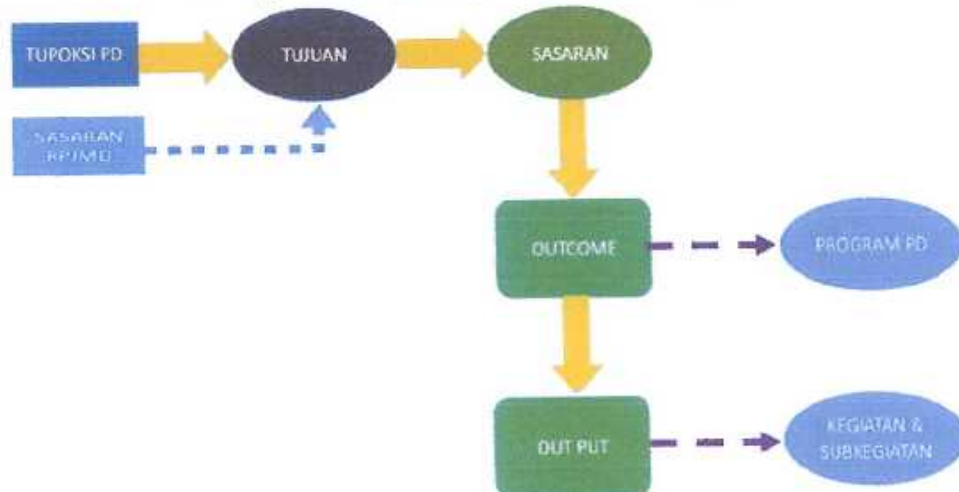
**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam upaya menjalankan visi-misi serta mencapai tujuan-sasaran rencana strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD yang saat ini masih dalam proses revidi, yang disusun dalam lampiran Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang terdiri dari Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (Rutin).

Selanjutnya, dalam mencapai target kinerja program (outcome) di masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (seperti Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



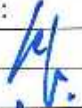


Sumber data: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	<i>[Signature]</i>
Kepala Bappelitbangda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan Tahun 2025-2029 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2025-2029 diuraikan dalam lampiran tabel 4.1.




62

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




*a ~*

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permen LHK No 27 Tahun 2021</li> <li>Perwal Kota Bekasi No 38 Tahun 2021</li> <li>Perpres No 97 Tahun 2017</li> <li>Perwal Kota Bekasi No 38 Tahun 2021</li> <li>Prioritas Nasional 2 Asta Cita</li> </ul>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan			1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari			Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penujangan Urusan Lingkungan Hidup	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			<b>Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</b>		
				Terlaksananya pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			<b>Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</b>		
				Terlaksananya pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</b>		
				Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibuyarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Indeks Kulaitas Air (IKA) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU)		
			Outcome: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			Outcome: Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN, PENCEMARAN, DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Indeks Kualitas Air (IKA)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU)		
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelithangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Tersusunnya laporan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun</i>	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	
				Terlaksananya Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana</i>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	
				Tersusunnya Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana</i>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
			<b>Outcome:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		<b>Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Hutan Kota yang terkelola</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	
				Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH/Taman Hutan Kota yang terkelola	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			<b>Outcome:</b> meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		<b>Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	
				Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terlaksana	Penyimpanan Sementara Limbah B3	
				Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
				Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian	<i>Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis</i>	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				teknis penyimpanan sementara limbah B3	<i>penyimpanan sementara limbah b3 yang dilakukan</i>		
				Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi &amp; Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
			<b>Outcome:</b> Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		<b>Persentase Pengawasan terkait ketataan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			<b>Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup</b>		<b>Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam Lingkungan Hidup</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Terselenggaranya Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
				Tertaksananya peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Outcome: Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Capaian perolehan penghargaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana		Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Outcome: Meningkatnya tata kelola		Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	




PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			persampahan				
					Persentase sampah yang terangkut ke TPA		
					Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA		
					Persentase Cakupan Area Pelayanan		
				Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	Pengelolaan Sampah	
				Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat/ kelompok yang meningkat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Tersedianya sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota yang tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota	
				Tersusunnya dokumen Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota yang tersusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang terangkut	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
				Terlaksananya Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Jumlah sampah yang terpilah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
				Terlaksananya Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan	Jumlah sampah yang tertangani	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi	

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Terlaksananya Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

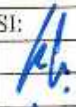


Sumber data: Data diolah Sekretariat DLH. 2025

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	50,70	47,16		47,46		47,75		48,04		48,34		48,64	
	Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan			1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	53,60	53,60		53,70		53,80		53,90		54,00		54,10	
			Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)			84.473.864.864		97.649.931.334		101.382.000.000		100.502.000.000		108.592.000.000		108.902.000.000	
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			84.473.864.864		97.649.931.334		101.382.000.000		100.502.000.000		108.592.000.000		108.902.000.000	
			Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,00%	100%	124.500.000	100%	10.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8 dokumen	124.500.000	4 dokumen	10.000.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen	60.000.000

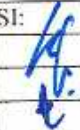


PARAF KOORDINASI:

Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN (OUTPUT))	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.01.2.0 1.9991	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 dokumen	98.000.000	-	0	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	46.000.000	4 dokumen	45.000.000	4 dokumen	50.000.000
		2.11.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	26.500.000	4 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000
			Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Pemungjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Pemungjang Urusan	92,87%	92,90%	74.333.378.970	93,00%	86.381.839.440	93,10%	89.727.000.000	93,15%	89.732.000.000	93,20%	97.737.000.000	93,25%	97.742.000.000
		2.11.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92,87%	92,90%	65.121.346.000	93,00%	88.064.331.000	93,10%	80.025.000.000	93,15%	80.030.000.000	93,20%	88.035.000.000	93,25%	88.040.000.000
		2.11.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.760 orang/bulan	5.138 orang/bulan	65.098.846.000	10.720 orang/bulan	89.054.331.000	10.220 orang/bulan	80.000.000.000	10.220 orang/bulan	80.000.000.000	10.220 orang/bulan	88.000.000.000	10.220 orang/bulan	88.996.000.000
		2.11.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	16 laporan	22.500.000	16 laporan	10.000.000	16 Laporan	25.000.000	16 Laporan	30.000.000	16 Laporan	35.000.000	16 Laporan	40.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NF 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	72,70	72,70	539.930.000	72,70	0	72,70	1.160.000.000	72,70	570.000.000	72,70	850.000.000	72,70	950.000.000
		2.11.01.2.0 5	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	100%	539.930.000	-	0	100%	1.160.000.000	100%	570.000.000	100%	850.000.000	100%	950.000.000
		2.11.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	10 unit	68.130.000	-	0	0	0	0	0	0	0	10 Unit	100.000.000
		2.11.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	336 paket	420.000.000	-	0	710 Orang	710.000.000	700 Orang	220.000.000	700 Orang	560.000.000	700 Orang	500.000.000
		2.11.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	12 orang	51.800.000	-	0	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000
		2.11.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	13 orang	-	0	-	0	75 Orang	300.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KAST	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASEL NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	582.525.800	100%	647.803.800	100%	1.090.000.000	100%	1.090.000.000	100%	1.090.000.000	100%	1.090.000.000
		2.11.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	11 paket	10.000.000	10 paket	40.000.000	10 paket	40.000.000	10 paket	40.000.000	10 paket	40.000.000
		2.11.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	442.367.000	4 paket	472.645.000	5 Paket	600.000.000	5 Paket	600.000.000	5 Paket	600.000.000	5 Paket	600.000.000
		2.11.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	40.158.800	1 paket (1 tahun)	40.158.800	1 paket (1 tahun)	100.000.000	1 paket (1 tahun)	100.000.000	1 paket (1 tahun)	100.000.000	1 paket (1 tahun)	100.000.000
		2.11.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratoran Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen (1 tahun)	25.000.000	12 dokumen (1 tahun)	50.000.000	12 dokumen (1 tahun)	50.000.000	12 dokumen (1 tahun)	50.000.000	12 dokumen (1 tahun)	50.000.000
		2.11.01.2.0 6.0008	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 dokumen	12 laporan	15.000.000	12 laporan (30 orang)	15.000.000	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	100.000.000
		2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 paket	1 paket	50.000.000	12 laporan	85.000.000	40 Laporan	200.000.000	40 Laporan	200.000.000	40 Laporan	200.000.000	40 Laporan	200.000.000
			Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang	Persentase Pengelolaan Barang Milik	95,83%	95,90%	9.476.855.894	96,00%	11.258.891.894	96,16%	10.450.000.000	96,15%	10.150.000.000	96,20%	9.950.000.000	96,25%	10.150.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASEL NE. 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			Milik Daerah yang Akuntabel	Daerah yang Akuntabel													
		2.11.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	258.174.000	100%	691.010.000	100%	1.000.000.000	100%	700.000.000	100%	500.000.000	100%	700.000.000
		2.11.01.2.0 7.9006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	64 unit	64 unit	58.174.000	36 Unit	591.010.000	35	800.000.000	26	500.000.000	15	300.000.000	36	500.000.000
		2.11.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 unit	20 unit	200.000.000	170 unit (50 unit kursi; 60 unit meja staf)	100.000.000	40	200.000.000	30	200.000.000	35	200.000.000	50	200.000.000
		2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8.629.507.170	100%	5.668.904.640	100%	8.612.000.000	100%	8.612.000.000	100%	8.612.000.000	100%	8.612.000.000
		2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	5.612.000.000	12 laporan	5.512.000.000	12 laporan	5.612.000.000	12 laporan	5.612.000.000	12 laporan	5.612.000.000	12 laporan	5.612.000.000
		2.11.01.2.0 8.6004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	3.017.507.170	12 laporan	156.904.640	12 laporan	3.009.000.000	12 laporan	3.000.000.000	12 laporan	3.000.000.000	12 laporan	3.000.000.000
		2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik	100%	100%	9.217.881.894	100%	10.567.881.894	100%	9.450.000.000	100%	9.450.000.000	100%	9.450.000.000	100%	9.450.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUIPI/T)	BASRELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TABUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan													
		2.11.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	6 unit	135.000.000	18 unit	135.900.000	6 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000
		2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	51 unit	250.000.000	41 unit	250.000.000	51 unit	400.000.000	51 unit	400.000.000	51 unit	400.000.000	51 unit	400.000.000
		2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 unit	96 unit	100.000.000	148 unit	160.000.000	120 Unit	100.000.000	120 Unit	100.000.000	120 Unit	100.000.000	120 Unit	166.000.000
		2.11.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchablitasi	3 unit	3 unit	8.732.881.894	1 unit	16.082.881.894	1 Unit	8.800.000.000	1 Unit	8.800.000.000	1 Unit	8.800.000.000	1 Unit	8.896.000.000
			Belanja Langsung Urutan (BLU)				112.051.758.991		378.689.456.630		350.923.762.379		343.783.269.280		356.068.265.536		371.999.829.569
				2. Indeks Kualitas Air (IKA)	38,62	56,76			56,96		57,16		57,36		57,56		57,76

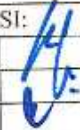

PARAF KOORDINASI:

Plt. Kepala DLH

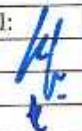


Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

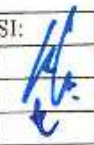


TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,10	45,55		46,05		46,55		47,05		47,55		48,05	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				0		300.000.000		315.540.000		333.715.104		350.801.317		369.604.268
			Outcome: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP	Persentase tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	0	0		100%		100%		100%		100%		100%	
		2.11.02.2.0 2	Pencelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	-	-	0	2 dokumen	300.000.000	4 dokumen	315.540.000	3 dokumen	333.715.104	2 dokumen	350.801.317	3 dokumen	369.604.268
		2.11.02.2.0 2.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	0	-	0	1 dokumen	100.000.000	-	0	-	0	1 dokumen	100.000.000
				Jumlah dokumen KLHS RPJPD-RPJMD yang disusun	-	-	0	-	0	1 dokumen	100.000.000	-	0	-	0	1 dokumen	100.000.000
		2.11.02.2.0 2.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	-	-	0	2 dokumen	300.000.000	1 dokumen	215.540.000	1 dokumen	333.715.104	1 dokumen	350.801.317	1 dokumen	269.604.268
				Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan	1	-	0	1 dokumen	100.000.000	-	0	-	0	1 dokumen	350.801.317	1 dokumen	269.604.268

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASRELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi (DIKPLHD)													
				Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Kota Bekasi	-	-	0	1 dokumen	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah Dokumen Revisi Rencana Perindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bekasi	-	-	0	1 dokumen	215.540.000	1 dokumen	333.715.104	-	0	-	0	-	0
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN, PENCEMARAN, DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
			Outcome: Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pertumbuhan Katupung Dalam	0	19,04		38,09		61,90		80,95		100		100	
				IKA	38,62	56,76		56,96		57,16		57,36		57,56		57,76	
				IKU	75,10	45,55		46,05		46,55		47,05		47,55		48,05	
						7.736.511.208		7.390.705.412		7.649.039.648		5.547.621.391		5.831.659.606		6.144.236.561	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	



TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NF 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.03.2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana	-	3 kegiatan	2.124.300.208	3 kegiatan	1.821.293.180	5 kegiatan	2.705.481.648	5 kegiatan	3.007.621.391	5 kegiatan	3.007.621.391	5 kegiatan	3.007.621.391
		2.11.03.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	407.755.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000
				Jumlah dokumen Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000
				Jumlah Kampung Iklim yang ditata dan dibangun	1 dokumen	1 dokumen	407.755.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000
		2.11.03.2.0 1.0094	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	209.580.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	250.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASIS NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Jumlah usaha/kegiatan yang dinilai dan dipantau	40 usaha/kegiatan	40 usaha/kegiatan	209.580.000	40 usaha/kegiatan	100.000.000	40 usaha/kegiatan	250.000.000	40 usaha/kegiatan	250.000.000	40 usaha/kegiatan	250.000.000	40 usaha/kegiatan	250.000.000
		2.11.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Laporan pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	-	-	0	-	0	106 lokasi	547.760.000	106 lokasi	547.760.000	106 lokasi	547.760.000	106 lokasi	547.760.000
				Jumlah titik pengolahan dan pengendalian mutu air	1 Laporan	Sub kegiatan Rekomendasi Rakortek Jabar "Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut" efektif digunakan per tahun 2027				1 Laporan	543.760.000	1 Laporan	543.760.000	1 Laporan	543.760.000	1 Laporan	543.760.000
				Rapat Pembahasan dan Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) (DISTARU)	26,33	33,67	0	33,74	0	33,81	4.000.000	33,88	4.000.000	33,95	4.000.000	34,07	4.000.000
		2.11.03.2.0 1.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-	-	0	-	0	3 paket	450.000.000	3 paket	450.000.000	3 paket	450.000.000	3 paket	450.000.000
				Jumlah titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	1 Laporan	Sub kegiatan Rekomendasi Rakortek Jabar "Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan" efektif digunakan per tahun 2027				1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000
				Jumlah alat ukur kualitas AQMS yang beroperasi	1 Laporan					2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Pil. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Jumlah Alat Passive Sampler dan Pengujian Parameter SO2 dan NO2	1 laporan					8 Unit	100.000.000	8 Unit	100.000.000	8 Unit	100.000.000	8 Unit	100.000.000
		2.11.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1.506.965.208	1 dokumen	1.021.293.180	1 dokumen	807.721.648	1 dokumen	1.109.861.391	1 dokumen	1.109.861.391	1 dokumen	1.109.861.391
				Jumlah laporan penyelenggaraan aktifitas laboratorium	1 laporan	1 laporan	1.506.965.208	1 laporan	1.021.293.180	1 laporan	807.721.648	1 laporan	1.109.861.391	1 laporan	1.109.861.391	1 laporan	1.109.861.391
		2.11.03.2.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana	-	1 kegiatan	2.261.211.000	1 kegiatan	700.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000
		2.11.03.2.0 2.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	7 laporan	9 laporan	2.261.211.000	8 Laporan	700.000.000	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000
				Jumlah peserta PROPERDA Kota Bekasi	1 laporan	1 laporan	91.054.000	20 usaha/kegiatan	100.000.000	20 usaha/kegiatan	50.000.000	20 usaha/kegiatan	50.000.000	20 usaha/kegiatan	50.000.000	20 usaha/kegiatan	50.000.000
				Jumlah usaha/kegiatan yang	-	1 laporan	280.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kubag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				diuji sumber emisi tidak bergerak (kendaraan bermotor)													
				Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	1 laporan	1 laporan	239.015.000	1 Laporan	100.000.000	Pekerjaan 1. Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien 2. Jumlah alat ukur kualitas AQMS yang beroperasi 3. Jumlah Alat Passive Sampler dan Pengujian Parameter SO2 dan NO2 per tahun 2027 dipindah ke sub kegiatan "Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan"							
				Jumlah alat ukur kualitas AQMS yang beroperasi	1 laporan	-	0	-	0								
				Jumlah Alat Passive Sampler dan Pengujian Parameter SO2 dan NO2	1 laporan	-	0	-	0								
				Jumlah alat ukur air sumbu pantau yang terpelihara	1 laporan	1 laporan	179.550.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000
				Jumlah titik pengelolaan dan pengendalian mutu air	1 laporan	1 laporan	547.760.000	1 laporan	350.000.000	Pekerjaan "Jumlah titik pengelolaan dan pengendalian mutu air" per tahun 2027 dipindah ke sub kegiatan "Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut"							
				inventarisasi	-	1 laporan	185.952.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				daya dukung daya tampung	-	1 laporan	361.050.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi (DIKPLHD)	-	1 dokumen	1.800.000	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi (DIKPLHD) dipindah ke program perencanaan lingkungan									

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kota Bekasi	-	1 dokumen	375.020.000	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dipindah ke program perencanaan lingkungan									
		2.11.05.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terlaksana	-	1 kegiatan	3.351.000.000	1 kegiatan	4.869.412.232	1 kegiatan	4.643.558.000	1 kegiatan	2.240.000.000	1 kegiatan	2.524.038.215	1 kegiatan	2.836.615.170
		2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2 Kegiatan	5 Kegiatan	3.351.000.000	5 Kegiatan	4.869.412.232	3 kegiatan	4.643.558.000	2 kegiatan	2.240.000.000	2 kegiatan	2.524.038.215	2 kegiatan	2.836.615.170
				Jumlah sampah/gulma yang terangkut di Krlh Bekasi	10.000 m3	10.000 m3	1.161.000.000	10.000 m3	715.854.232	10.000 m3	500.000.000	10.000 m3	500.000.000	10.000 m3	784.038.215	10.000 m3	1.096.615.170
				kubus aptung	-	1 kegiatan	450.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah Operasional IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	1.740.000.000	1 unit	1.750.000.000	1 unit	1.740.000.000	1 unit	1.740.000.000	1 unit	1.740.000.000	1 unit	1.740.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NF. 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Operasional IPAL (BANDKI)	Biaya operasi di IPAL selama 1 Tahun	-	0	Biaya operasi 1 IPAL selama 1 Tahun	2.403.558.000	Biaya operasi 1 IPAL selama 1 Tahun	2.403.558.000	-	0	-	0	-	0
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				326.049.000		250.000.000		262.950.000		278.095.920		292.334.431		308.003.557
			Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Hutan Kota yang terkelola	100,00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2.11.04.2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	1 kegiatan	326.049.000	1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	262.950.000	1 kegiatan	278.095.920	1 kegiatan	292.334.431	1 kegiatan	308.003.557
		2.11.04.2.0 1.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kevenangan Kabupaten/Kota	8,3 Ha	8,3 Ha	326.049.000	8,3 Ha	250.000.000	8,3 Ha	262.950.000	8,3 Ha	278.095.920	8,3 Ha	292.334.431	8,3 Ha	308.003.557
				Jumlah Taman Hutan Kota yang terbuka dan terkelola	5 lokasi	5 lokasi	326.049.000	5 lokasi	250.000.000	5 lokasi	262.950.000	5 lokasi	248.095.920	5 lokasi	262.334.431	5 lokasi	278.003.557
				Pencanaan Kebun Buah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Pembangunan Kebun Buah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Pemeliharaan kebun buah	-	-	0	-	0	1 lokasi	30.000.000	1 lokasi	30.000.000	1 lokasi	30.000.000	1 lokasi	30.000.000
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				254.175.000		150.000.000		157.770.000		166.857.552		175.400.659		184.802.134
			Outcome: meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	55%	50%		50%		50%		50%		50%		50%	
		2.11.05.2.0 1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	22.255.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	107.770.000	1 kegiatan	116.857.552	1 kegiatan	125.400.659	1 kegiatan	130.000.000
		2.11.05.2.0 1.0992	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	60 laporan	100 Laporan	22.255.000	Berdasarkan nomenklatur penatausahaan SIPD Sub kegiatan ini dihapuskan mulai tahun 2026 sehingga pekerjaan pada sub kegiatan ini masuk kedalam subkegiatan "Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3"									
			Verifikasi Lapangan Pemenuhan	60 laporan	100 Laporan	22.255.000											

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3													
		2.11.05.2.0 1.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah b3 yang dilakukan	60 laporan	-	0	100 laporan	50.000.000	50 Laporan	107.770.000	50 Laporan	116.857.552	50 Laporan	125.400.629	50 Laporan	130.000.000
				Pembinaan dan Pemantauan terkait Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	60 laporan	-	0	100 usaha	50.000.000	50 Laporan	50.000.000	50 laporan	50.000.000	55 laporan	55.000.000	60 laporan	60.000.000
				Monitoring dan Evaluasi untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	0	-	0	-	0	60 laporan	66.857.552	-	0	70 laporan	70.000.000
				Honorarium Moderator/Narasumber Pembahas	-	-	0	-	0	1 Laporan	10.000.000	-	0	1 Laporan	10.000.000	-	0

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Pengelolaan Limbah B3													
				Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	-	-	0	-	0	100 orang	47.770.000	-	0	120 orang	60.400.659	-	0
		2.11.05.2.0 2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	-	1 kegiatan	231.920.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	54.802.134
		2.11.05.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai	-	1 dokumen	231.920.000	2 dokumen	160.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	54.802.134



PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				dengan Kevelegannya													
				Jumlah Depo yang terbangun beserta Fasilitasnya untuk penyimpanan Limbah B3 Rumah tangga	-	-	0	1 unit	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
				Sarana dan Prasarana Fasilitas Depo Penyimpanan Limbah B3 Rumah Tangga	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	-	-	0	60 kali	50.000.000	-	0	-	0	-	0	30 kali	15.000.000
				kegiatan fasilitasi limbah B3 rumah tangga	-	1 dokumen	231.920.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Limbah B3 Rumah tangga	-	-	0	-	0	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	40 orang	39.802.134
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				112.770.000		13.007.660.000		13.012.840.000		111.238.368		116.933.772		123.201.423
			Outcome: Meningkatnya	Persentase Pengawasan terkait	100% (60)	100% (60 usaha)		100% (50 usaha)		100% (50 usaha)		100% (50 usaha)		100% (50 usaha)		100% (50 usaha)	




PARAF KOORDINASI:

Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NF 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	usaha pengawasan, dan 50 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 50 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	110 Badan usaha	110 Badan usaha	112.770.000	90 Badan usaha	13.007.660.000	90 Badan usaha	13.012.840.000	90 Badan usaha	111.238.368	90 Badan usaha	116.933.772	90 Badan usaha	123.201.423
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Badan usaha	110 Badan usaha	112.770.000	90 Badan usaha	13.007.660.000	90 Badan usaha	13.012.840.000	90 Badan usaha	111.238.368	90 Badan usaha	116.933.772	90 Badan usaha	123.201.423

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (pengawasan)	100% (60 usaha dan/atau kegiatan)	100% (60 usaha dan/atau kegiatan)	48.330.000	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	50.000.000	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	50.000.000	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	50.000.000	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	50.000.000	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	50.000.000	
			Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina (pembinaan)	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	64.440.000	100% (40 usaha dan/atau kegiatan)	50.000.000	100% (40 usaha dan/atau kegiatan)	55.180.000	100% (40 usaha dan/atau kegiatan)	61.238.368	100% (40 usaha dan/atau kegiatan)	66.933.772	100% (40 usaha dan/atau kegiatan)	73.201.423	
			Monitoring, Evaluasi, Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu	3 dokumen	-	0	3 dokumen	12.907.660.000	3 dokumen	12.907.660.000	-	0	-	0	-	0	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUBAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			415.375.000		250.000.000		262.950.000		278.095.920		292.334.431		308.003.557	
			Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam Lingkungan Hidup	80%	80%		100%		100%		100%		100%		100%	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASEL1 NF. 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.08.2.0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	3 kegiatan	415.375.000	3 kegiatan	250.000.000	2 kegiatan	262.950.000	2 kegiatan	278.095.920	2 kegiatan	292.334.431	2 kegiatan	308.083.557
		2.11.08.2.0 1.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	1 dokumen	15.375.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000
				Jumlah sekolah adiwiyata yang didampingi	-	50 sekolah	15.375.000	50 sekolah	50.000.000	50 sekolah	50.000.000	50 sekolah	50.000.000	50 sekolah	50.000.000	50 sekolah	50.000.000
		2.11.08.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	4050 orang	200 orang	250.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	212.950.000	200 orang	228.095.920	200 orang	242.334.431	200 orang	258.083.557
				Jumlah masyarakat yang mendapat informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	4050 orang	200 orang	250.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	212.950.000	200 orang	228.095.920	200 orang	242.334.431	200 orang	258.083.557
		2.11.08.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber	Jumlah lembaga pendidikan formal	-	60 Lembaga	150.000.000	60 Lembaga	100.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			<i>Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat</i>	<i>lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>													
				Jumlah Kelompok masyarakat /instansi yang meningkat kompetensi SDMnya	-	60 Lembaga	150.000.000	60 Lembaga	100.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
		2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				255.198.000		150.000.000		157.770.000		166.857.552		175.400.659		184.802.134
			Outcome: Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	80%	80%		73%		73%		73%		73%		73%	
				Capaian perolehan penghargaan Lingkungan Hidup	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan	-	21 Entitas	255.198.000	15 Entitas	150.000.000	15 Entitas	157.770.000	15 Entitas	166.857.552	15 Entitas	175.400.659	15 Entitas	184.802.134

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappedlitbangda	
Kabag Hukum	



TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.99.2.0 1.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Didatut Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 entitas	21 Entitas	255.198.000	15 Entitas	150.000.000	15 Entitas	157.770.000	15 Entitas	166.857.552	15 Entitas	175.400.659	15 Entitas	184.802.134
				Jumlah Sekolah adiwiyata yang dinilai	15 sekolah	21 sekolah	255.198.000	15 sekolah	150.000.000	15 sekolah	157.770.000	15 sekolah	166.857.552	15 sekolah	175.400.659	15 sekolah	184.802.134
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				77.990.600		25.000.000		26.295.000		27.809.592		29.233.443		30.800.356
			Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2.11.10.2.0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-	25 pengaduan	77.990.000	25 pengaduan	25.000.000	25 pengaduan	26.295.000	25 pengaduan	27.809.592	25 pengaduan	29.233.443		30.800.356

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.10.2.0 1.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 dokumen	25 dokumen	77.990.000	Sesuai dengan perubahan nomenklatur 2.11.10.2.01.0004 mulai tahun 2026-2030 menggunakan nomor 2.11.10.2.01.0009									
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/ditangani	25 pengaduan	25 pengaduan	77.990.000											
			Jumlah pemeliharaan sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan sarana pendukungnya	-	-	0											
		2.11.10.2.0 1.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-	-	0	25 pengaduan	25.600.000	25 pengaduan	26.295.000	25 pengaduan	27.809.592	25 pengaduan	29.233.443	25 pengaduan	30.800.356
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/ditangani	-	-	0	25 pengaduan	25.000.000	25 pengaduan	26.295.000	25 pengaduan	27.809.592	25 pengaduan	29.233.443	25 pengaduan	30.800.356	

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	

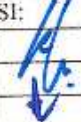


TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASU	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELJ N/E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				202.873.690.783		317.166.091.218		329.078.607.731		336.872.977.881		348.804.167.218		364.346.375.579
			Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	11,97%	13,00%		13,50%		13,70%		13,90%		14,10%		14,30%	
				Persentase sampah yang terangkut ke TPA	71,10%	62%		62%		63%		95%		95%		95%	
				Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	71,50	73,10		71,50		71,50		71,50		71,50		71,50	
				Persentase Cakupan Area Pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2.11.11.2.0 1	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	-	409.569	202.873.690.783	410.310	317.166.091.218	411.124	329.078.607.731	412.020	336.872.977.881	413.005	348.804.167.218	414.116	364.346.375.579
		2.11.11.2.0 1.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok, Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Bebas Masyarakat	1 kelompok	366 kelompok	804.146.000	3 kelompok	62.301.598.875	1 kelompok	65.136.398.875	1 kelompok	2.040.000.000	1 kelompok	2.545.000.000	1 kelompok	3.056.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Jumlah bank sampah unit	-	-	0	55 BSU	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah operasional BSIP	-	395 <i>kelompok</i>	212.145.000	45 Orang BSIP, sarana dan prasana BSU	500.000.000	150 BSU, saprasi BSU	1.500.000.000	200 BSU, saprasi BSU	2.000.000.000	250 BSU, saprasi BSU	2.500.000.000	300 BSU, saprasi BSU	3.000.000.000
				sewa gudang BSIP	-	1 laporan	30.000.000	-	0	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000
				POKIR	-	1 laporan	562.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat di Sekitar TPST Bantargebang (BANDKI)	-	-	0	Jumlah keluarga penerima bantuan langsung tunai : Cikewal 7.466 KK Ciketing udik 6.579 KK Sumar batu 6.397 KK Bantargebang 11.000 KK Total 31.442 KK	61.601.598.875	Jumlah keluarga penerima bantuan langsung tunai : Cikewal 7.466 KK Ciketing udik 6.579 KK Sumar batu 6.397 KK Bantargebang 11.000 KK Total 31.442 KK	61.601.598.875	-	0	-	0	-	0

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	

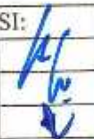


TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.11.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrisesan Akhir	1064 unit	36 unit	32.010.413.866	1064 Unit	81.719.902.972	520	89.051.978.360	533	26.194.546.262	570	26.025.543.785	382	31.565.943.960
			Pengadaan Gerobak Sampah		-	39 unit	109.629.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
			Pengadaan Ember Pemilahan Sampah		-	-	0	Paket (Perencanaan, Pengawasan, Pembangunan Jembatan Timbang Kosong)	100.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Jumlah kendaraan operasional angkutan sampah		-	-	0	20 unit Timbangan duduk, 319 timbangan gantung	250.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
			Mesin Potong Runtup (APBD PSPLB3)		-	4 unit	22.000.000	-	0	10 unit	35.000.000	15 unit	55.500.000	20 unit	74.000.000	25 unit	95.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	




TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Bak Sampah Gantung 75lt (APBD PSPLB3)	-	57 unit	62.000.000	-	0	63 unit	76.230.000	69 unit	92.238.300	76 unit	111.608.343	57 unit	135.046.095
				Bak Sampah Gantung 50lt (APBD PSPLB3)	-	18 unit	21.600.000	-	0	20 unit	31.624.560	22 unit	38.265.718	24 unit	46.301.519	26 unit	56.024.838
				Tempat Sampah Docong (APBD PSPLB3)	-	20 unit	25.300.000	-	0	22 unit	30.613.000	24 unit	37.041.730	26 unit	44.820.493	29 unit	54.232.797
				Pengadaan Surplus Bidang PSPLB3	-	23 jenis	138.101.750	-	0	23 jenis	151.911.925	23 jenis	167.103.118	23 jenis	183.813.430	23 jenis	202.194.773
				Jumlah Bak Kontainer Sampah yang tersedia	-	53 unit	3.180.000.000	-	0	10	600.000.000	20 Unit	1.200.000.000	20 unit	1.200.000.000	35 unit	2.100.000.000
				Jumlah Kendaraan operasional angkutan sampah yang terawat	-	348 unit	10.900.110.000	256 unit	11.000.000.000	356 unit	10.900.000.000	356 unit	11.100.110.000	356 unit	10.900.000.000	356 unit	10.900.000.000
				Jumlah Penyelenggaraan aktifitas/penunjang operasional LPTD LH (Alat Kebersihan, Terpal, PDL, Sewa Lapangan, Sewa Bangunan Gedung Kantor)	-	8 jenis	1.892.221.720	-	0	9 jenis	2.625.000.000	11 jenis	3.104.287.396	9 jenis	2.625.000.000	11 jenis	4.623.445.457
				Terawatnya Sarana dan Prasarana Pool kendaraan Angkutan sampah di Bojong Menteng	-	400.000 ton	1.157.855.396	400.000 ton	1.019.877.796	Dipindahkan ke sub kegiatan "Penanganan sampah melalui pengangkutan"							

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappclitbangda	
Kabag Hukum	

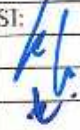

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Armroll, Dumptruck)	-	8 unit	5.120.000.000	-	0	5 dump truck	3.000.000.000	10 dump truck, 5 arm roll	9.400.000.000	13 dump truck, 3 arm roll	9.840.000.000	15 dump truck, 5 arm roll	12.400.000.000
				Jumlah penyelenggaraan operasional TPA Samur Batu dan swapantan	-	9 jenis	4.462.928.000	1 laporan	2.211.802.180	Dipindahkan ke sub kegiatan "Penanganan sampah melalui pengangkutan"							
				Penanganan longsoran sampah di Kali Asem	-	3 bulan	2.812.500.000	3 bulan	2.100.376.871	Dipindahkan ke sub kegiatan "Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah"							
				POKIR	-	1 laporan	82.000.000	1 laporan	1.373.400.000	-	0	-	0	-	0	-	0
				Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di 12 wilayah Kecamatan, UPTD Kontainer dan UPTD Protokol	-	-	0	1 Unit	2.062.847.250	-	0	-	0	-	0	-	0
				Pendampingan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi	-	1 laporan	2.024.170.000	-	0	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000
				Penanganan sampah di kali asem (BANDKI)	-	-	-	0	1, Terlaksana nya Pembersih an Sampah di Kali Asem	32.300.799.438	1, Terlaksana nya Pembersih an Sampah di Kali Asem	32.300.799.438	-	0	-	0	0

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLII	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

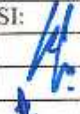


TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
								2. Tersedianya : ATK, Natura, BBM, peralatan kebersihan		2. Tersedianya : ATK, Natura, BBM, peralatan kebersihan							
								3. Penciptaan Lapangan Kerja 230 orang (non teknis) untuk warga sekitar TPST Baatargebang		3. Penciptaan Lapangan Kerja 230 orang (non teknis) untuk warga sekitar TPST Baatargebang							
				Pengadaan kendaraan pengangkut sampah diwilayah Kecamatan Baatargebang (BANDKI)				Jumlah kendaraan pengangkut sampah : 9 unit dump truck 7 m3 7 unit dump truck 14 m3 9 unit Arm Roll	29.300.799.437	Jumlah kendaraan pengangkut sampah : 9 unit dump truck 7 m3 7 unit dump truck 14 m3 9 unit Arm Roll	29.300.799.437	-	0	-	0	0	
		2.11.11.2.0 1.6008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi	Jumlah dokumen kebijakan dan	2 dokumen	1 dokumen	325.150.000	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	950.000.000	-	0	-	0	-	0

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELI NR. 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TABUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			Daurah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan													
				Penyusunan Grand Design TPA	-	-	0	-	0	1 dokumen	750.000.000	-	0	-	0	-	0
				Jumlah penyusunan DED Revitalisasi TPA Sumurbatu	-	1 dokumen	325.150.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Perluasan TPA Sumur Baru (BANKDI)	-	-	0	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	-	0	-	0	-	0
		2.11.11.2.0 1.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	-	0	-	0	421.068 ton	6.000.000.000	421.964 ton	6.500.000.000	422.949 ton	7.000.000.000	424.050 ton	7.900.000.000
				Jumlah penyelenggaraan operasional TPA Sumur Batu dan swasantau	-					13 jenis	5.000.000.000	13 jenis	5.500.000.000	13 jenis	6.000.000.000	13 jenis	6.000.000.000
				Terawatnya Sarana dan Prasarana Pool kendaraan Angkutan sampah di Bejong Menteng	-					12 jenis	1.000.000.000	12 jenis	1.000.000.000	12 jenis	1.000.000.000	12 jenis	1.000.000.000
										Sub kegiatan Rekomendasi Rakortek Jabar "Penanganan sampah melalui pengangkutan" efektif digunakan per tahun 2027							

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	



TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		2.11.11.2.0 1.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-	-	0	-	0	100%	2.402.450.000	100%	2.402.450.000	100%	2.402.450.000	100%	2.402.450.000
				Penanganan langsung sampah di Kali Asem	-	Sub kegiatan Rekomendasi Rakortek Jabar "Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah" efektif digunakan per tahun 2027				3 Bulan	2.402.450.000	3 Bulan	2.402.450.000	3 Bulan	2.402.450.000	3 Bulan	2.402.450.000
		2.11.11.2.0 1.0917	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	384.710 ton	417.081 ton	167.695.413.917	400.000 ton	110.492.990.494	88.776 ton	106.385.981.619	90.072 ton	269.335.981.619	91.368 ton	298.531.173.433	92.664 ton	306.227.981.619
				Jumlah kendaraan operasional yang beroperasi	-	403 unit	20.980.850.042	403	17.575.694.272	405	21.188.970.339	420	21.188.970.339	456	22.084.162.153	433	21.188.970.339
				Jumlah aktifitas/penunjang operasional UPTD LH (Gaji TKK, dan asuransi)	-	1435 orang	69.675.435.080	1500 orang	62.976.816.657	1170 Orang	54.365.063.280	1110 Orang	54.365.063.280	1110 Orang	54.365.063.280	1310 Orang	54.365.063.280
				Jumlah penyelenggaraan operasional TPA	-	72 orang	18.417.657.915	71 orang	16.519.008.685	71 orang	17.550.000.000	71 orang	18.000.000.000	71 orang	19.000.000.000	71 orang	20.000.000.000

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Sumur Batu dan swapantau (Gaji TKK TPA dan BBM)													
				Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di Wilayah kecamatan (Gaji PHL dan BPJS IPTD Kebersihan wilayah, Kontainer, Protokol, Hutun Kota, Perbengkelan, Lab)	-	276 orang	13.421.470.880	356 orang	13.421.470.880	276 Orang	13.281.948.000	276 Orang	13.281.948.000	276 Orang	13.281.948.000	276 Orang	13.281.948.000
				Penanganan Sampah TPA Kota Bekasi	-	4 dokumen, 2 bangunan	45.200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
				Biaya Layanan Pengolahan Sampah (tipping fee)	-	-	0	-	0	-	0	1 laporan	182.500.000.000	1 laporan	189.800.000.000	1 laporan	197.392.000.000
		2.11.11.2.0 1.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	8 ton	8 ton	2.038.565.000	6 ton	6.245.598.877	50 ton	70.151.598.877	55 ton	10.400.000.000	60 ton	12.306.000.000	65 ton	14.190.000.000
				Jumlah DED Pembangunan TPS 3R	-	2 Dokumen	126.865.000	4 DED	50.000.000	4 DED	1.200.000.000	4 DED	1.500.000.000	4 DED	1.750.000.000	4 DED	2.000.000.000
				Pembangunan TPS 3R	-		500.000.000	-	0	2 UNIT	1.500.000.000	2 UNIT	2.000.000.000	2 UNIT	2.500.000.000	2 UNIT	3.000.000.000
				Jumlah pengurangan sampah residu melalui TPS 3R/romah	-	4 unit	1.158.500.000	4 unit	500.000.000	2 UNIT	3.500.000.000	2 UNIT	4.000.000.000	2 UNIT	4.500.000.000	2 UNIT	5.000.000.000

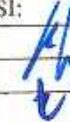


PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFI KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				kompos/PDU/TP/B terdaftar													
				Penguatan komitmen pelaku usaha dan keterlibatan masyarakat melalui penerapan kewajiban pengurangan sampah	-	40 orang	120.000.000	-	0	100 Org	700.000.000	110 Org	750.000.000	120 org	800.000.000	130 Org	850.000.000
				Sosialisasi dan pembuatan kandang Maggot serta sarana pendukungnya	-	-	0	60 kandang Maggot	500.000.000	120 Kandang maggot	1.850.000.000	150 kandang maggot	2.150.000.000	170 kandang maggot	2.750.000.000	200 kandang maggot	3.250.000.000
				Sosialisasi dan Pembuatan Kandang Maggot Serta Sarana Pendukungnya (BANDKI)	-	-	0	Jumlah kandang maggot yang dibangun : 20 kandang	20.467.199.625	Jumlah kandang maggot yang dibangun : 20 kandang	20.467.199.625	-	0	-	0	-	0
				Pembangunan TPS 3R dan Sarana Pendukungnya (BANDKI)	-	-	0	Jumlah sarana pendukung TPS 3R antara lain : Mesin Pencacah Organik : 1 Unit Mesin Pencacah	20.467.199.625	Jumlah sarana pendukung TPS 3R antara lain : Mesin Pencacah Organik : 1 Unit Mesin Pencacah	20.467.199.625	-	0	-	0	-	0

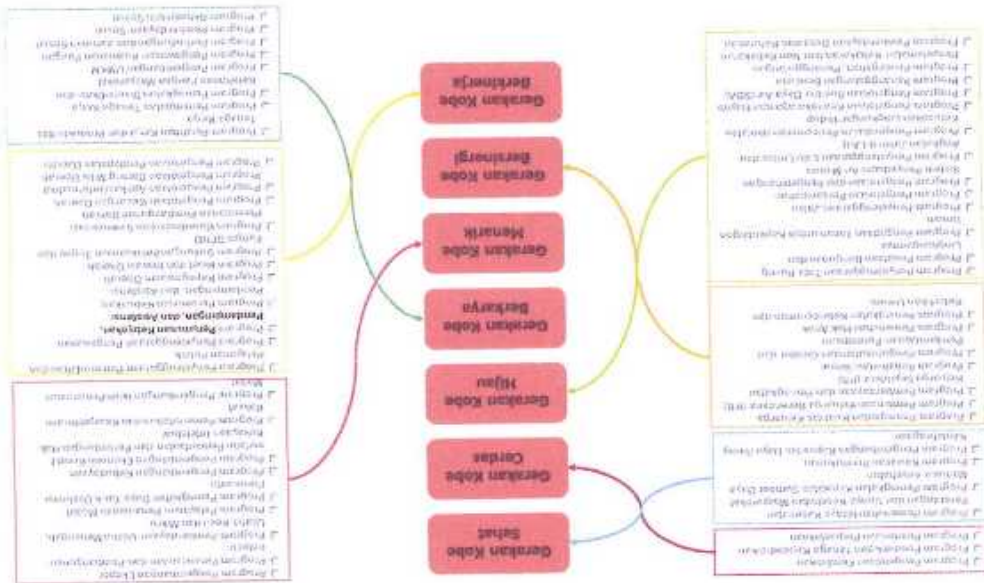
PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						Tahun 2025 (efisiensi dan rasionalisasi)		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
								Plastik : 1 Unit Mesin Pengayak Kompos : 1 Unit Mesin Press Hidrolik : 1 Unit			Plastik : 1 Unit Mesin Pengayak Kompos : 1 Unit Mesin Press Hidrolik : 1 Unit						
				Pembangunan Sarana Incenerator di Kecamatan Bantargebang (BANDKI)	-	-	0	Jumlah bangunan incenerator yang tersedia : 1 unit	20.467.199.627	Jumlah bangunan incenerator yang tersedia : 1 unit	20.467.199.627	-	0	-	0	-	0
				Poker	-	1 laporan	133.700.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>TOTAL</b>							296.525.623.855		436.339.387.964		452.305.762.379		444.285.269.280		464.660.265.536		480.901.829.569

Sumber data: Data diolah Sekretariat dan Bidang-bidang DLH. 2025

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelithangda	
Kabag Hukum	

Untuk mendukung program unggulan Wali Kota dan Wakil Kota Bekasi yang diperkenalkan dengan "Sapta Program Kota Bekasi Keren", terdapat 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mendukung salah satunya yaitu "Gerakan Kobe Hijau" yang dapat dilihat pada gambar 4.1.



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Perda No 10 Tahun 2025)  
 Gambar 4. 2 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Pada gambar diatas, terdapat 3 (tiga) program prioritas yang menjadi turunan dari dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya, 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan 3) Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	1	2	4	5
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Menuurnnya pencemaraan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Lingkungan Hidup	3	4	5
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
2	Program Pengelolaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

PARAF KOORDINASI:	
Pt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Selain Program Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung Sasaran Prioritas Walikota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam Gerakan Kobe Hijau. Berikut sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung Sasaran Prioritas Kobe Hijau diantaranya

Sumber data: Data diolah Sekretariat dan Bidang-bidang DLH, 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Keanekaragaman Hayati	keanekaragaman hayati		5
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
3	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	<b>Pengelolaan Sampah</b>	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Persediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Peningkatan sampah melalui pengangkutan	
			Peningkatan sampah melalui pengumpulan sampah	
			Peningkatan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

NO	GERAKAN KOBÉ	SASARAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
1	KOBÉ HIJAU	Diterapkannya pola terobosan "Pengembangan Nilai Ekonomi Masyarakat Sadar Sampah dan perluasan lahan TPA	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2. Pengurangan Sampah melalui Pendaur Ulang Sampah

Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan DLH dalam Mendukung Gerakan Kobe Hijau

Selain Program dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung Penanggulangan dan Pengerantasan Kemiskinan, ini merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengerantasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	Peningkatan Kualitas Hutan dan Infrastruktur	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/PTST/SPA Kabupaten/Kota	
2	Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluran Hidup dan Lingkungan	Pengelolaan Hidup untuk Lembaga	Pengelolaan Hidup dan Kampanye Lingkungan	

PARAF KOORDINASI:	Pt. Kepala DLH	Kepala Bappeditbangda	Kabag Hukum
-------------------	----------------	-----------------------	-------------

PARAF KOORDINASI:	Pt. Kepala DLH
	Kepala Bappedihbangda
	Kabag Hukum

Kota Bekasi, yang ditampilkkan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan/atau dampak yang menggambarakan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik

**4.2. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup**

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik dan/atau dampak yang menggambarakan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik dan/atau dampak yang menggambarakan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik

Sub kegiatan yang tercantum dalam daftar ini merupakan turunan dari program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah. Dengan adanya daftar ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program secara konsisten dan akuntabel.



NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KFT
		Hidup untuk Masyarakat	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Sumber data: Bappedihbangda Kota Bekasi, 2025

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS	Indeks	53,60	53,70	53,80	53,90	54,00	54,10	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,76	56,96	57,16	57,36	57,56	57,76	(berdasarkan keputusan direktur jenderal ppklh no sk 129 tahun 2024 tentang target IKLH tahun 2025-2029)
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	45,55	46,05	46,55	47,05	47,55	48,05	



Sumber data: Data diolah Sekretariat dan Bidang-bidang DLH. 2025

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	47,16	47,46	47,75	48,04	48,34	48,64	Penanggung jawab perhitungan IKLH antara DLH dan DISTARU 2025 masih menggunakan RENSTRA RPD 2025 masih menggunakan RENSTRA RPD
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	-	53,70	53,80	53,90	54,00	54,10	
3	Persentase Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	-	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	

Sumber data: Data diolah Sekretariat dan Bidang-bidang DLH. 2025

PARAF KOORDINASI:	
Ptt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi seperti yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang merupakan rencana tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama lima tahun dan menjadi acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemantauan dan pengawasan serta pengambilan kebijakan.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

**Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Bekasi,**



**Dra. Kiswatiningsih, M.Sc.**

Revisi Tk.I/ IV.b

NIP. 19751222 199803 2 005